DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026





KATA PENGANTAR

Om Swastiastu,

Tantangan pembangunan jangka menengah yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Denpasar khususnya Dinas Perhubungan kedepan semakin kompleks, untuk itu sangat diperlukan suatu perencanaan strategis yang lebih mantap. Dengan perencanaan yang lebih baik dari sebelumnya maka diharapkan program pembangunan akan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026 ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota Denpasar untuk lima tahun kedepan.

Dengan perencanaan strategis yang terarah dan sistematis maka pembangunan di bidang perhubungan diharapkan menuju pada Visi Wali Kota yaitu: **"Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju"** dan menunjang Misi II Wali Kota yaitu: **"Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana",** Misi III **" Kejujuran dan spirit swakadarma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola kepemerintahan yang baik *(Good Governance)*** serta menunjang Misi IV **"Unggul kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana"**

Pada kesempatan ini pula kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan pemikiran sehingga Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Denpasar Tahun 2021 - 2026 dapat diselesaikan. Kami menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna, untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan.

Akhir kata semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembangunan bidang perhubungan yang bermuara pada peningkatan pelayanan bagi masyarakat.

Om, Shanti Shanti, Shanti, Om

Denpasar, 24 September 2021
Kepala Dinas Perhubungan
Kota Denpasar

PEMERINTAH KOTA DENPASAR DINAS PERHUBUNGAN

I Dewa Putu Sriawan, SE.
Pembina Tk I
NIP : 19680714 199603 1 003

DAFTAR ISI

Isi	Halaman
JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	**1**
1.1. Latar Belakang	1
1.1.1 Pengertian Restra Dinas Perhubungan Kota Denpasar	1
1.1.2 Proses Penyusunan Renstra	2
1.1.3 Keterkaitan Antara Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	8
1.2 Landasan Hukum	9
1.3 Maksud dan Tujuan	12
1.3.1 Maksud	12
1.3.2 Tujuan	12
1.4 Sitematika Penulisan	13
BAB II GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH	**14**
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	14
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	27
2.2.1 Sumber Daya Manusia	27
2.2.2 Aset/ Modal	29
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	33
2.3.1 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Denpasar	33
2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah	35
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	41
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	**42**
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	42
3.1.1 Isu Strategis Perkotaan	42
3.1.2 Identifikasi Permasalahan yang Timbul	44
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	46
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	47
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	47
3.5 Analisis SWOT	49
3.6 Penentuan Isu-isu Strategis	51
3.6.1 Perkembangan Tata Guna Lahan	51
3.6.2 Pengembangan Pusat-pusat Perbelanjaan dan Perdagangan	52

3.6.3 Pembangunan Hotel dan Condotel 53
3.6.4 Perkembangan Permukiman..... 53
3.6.5 Perkembangan Sekolah 54
3.6.6 Perkembangan Prasarana Transportasi 54

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 57
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah..... 57

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 59
5.1 Perumusan Strategi..... 59
5.2 Arah Kebijakan 59

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 65

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 110

BAB VIII PENUTUP 115

LAMPIRAN-LAMPIRAN 116

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
2.1	Komposisi Pegawai Menurut Golongan Tahun 2021	27
2.2	Komposisi Pegawai Menurut Eselon Tahun 2021	27
2.3	Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2021.....	28
2.4	Komposisi Pegawai Menurut Status Kepegawaian Tahun 2021.....	28
2.5	Jumlah Pegawai Kualifikasi Diklat Teknis Tahun 2021	28
2.6	Jumlah Pegawai Diklat Penjenjangan Tahun 2021	29
2.7	Aset Dinas Tahun 2021.....	29
2.8	Terminal di Kota Denpasar Tahun 2021	32
2.9	Pelabuhan di Kota Denpasar Tahun 2021	33
2.10	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Denpasar	34
2.11	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	35
3.1	Analisis SWOT Kebijakan Transportasi di Kota Denpasar	50
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas.....	58
5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	64
6.1	Rencana, Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kota Denpasar	69
7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan	111
7.2	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu	114

DAFTAR GAMBAR

2.1	Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Denpasar	26
3.1	Grafik Jumlah Kendaraan Pada Kabupaten/Kota	43
5.1	Tujuan Transportasi Berkelanjutan	62

BAB I
Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Renstra Dinas Perhubungan Kota Denpasar

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima tahun ke depan disusun Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengenai tata cara penyajian dokumen Renstra. Rencana strategis PD yang selanjutnya disingkat Renstra PD. Fungsi Renstra PD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD dalam pembangunan daerah. Renstra PD, memuat tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RJPMD) yang bersifat indikatif. Dengan demikian Renstra PD pada dasarnya merupakan penjabaran dari RPJMD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

RPJMD berisi indikasi program pemerintah daerah selama lima tahun kedepan, selanjutnya diterjemahkan kedalam Rencana Strategis Kota dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah (Renja PD). Dalam tahun berjalan, pelaksanaan Renja PD ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh PD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Denpasar Periode Tahun 2021 – 2026 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan identifikasi permasalahan, telaah visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaah hasil evaluasi renstra periode lima tahun sebelumnya, dan telaah RTRW.

Dinas Perhubungan Kota Denpasar sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kota Denpasar memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan

transportasi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kota Denpasar 2021 – 2026 yaitu **"Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju"** dengan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat
2. Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana
3. Kejujuran dan spirit Sewaka Dharma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)
4. Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana
5. Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan

1.1.2 Proses Penyusunan Renstra

1.1.2.1 Persiapan Penyusunan Renstra PD

Tahapan persiapan penyusunan Renstra PD dilakukan untuk menyiapkan keseluruhan kegiatan penyusunan Renstra PD Provinsi dan kabupaten/kota.

1.1. Pembentukan Tim Penyusun Renstra PD

Pembentukan tim penyusun Renstra PD dimulai dari penyiapan rancangan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra PD provinsi dan kabupaten/kota. Susunan keanggotaan tim berasal dari pejabat dan staf bersangkutan yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran. Anggota tim penyusun yang dilibatkan harus siap bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renstra PD. Dengan demikian perlu dipilih orang-orang yang mempunyai kesiapan waktu dan kemampuan teknis yang cukup. Sedapat mungkin anggota tim menguasai substansi fungsi dan tugas Perangkat Daerah. Tim penyusun terdiri atas perwakilan dari setiap unit kerja (bagian/bidang/subdin/atau sebutan lain) yang ada di masing-masing Bidang

dan dapat melibatkan tenaga ahli sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Tugas tim penyusun Renstra PD dijabarkan kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja sampai dengan ditetapkannya Renstra PD.

Tim penyusun Renstra PD dipersiapkan oleh Kepala Dinas dan diusulkan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dengan surat keputusan kepala daerah. Susunan keanggotaan tim penyusun Renstra PD yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah ini sekurangkurangnya sebagai berikut:

Ketua Tim : Kepala PD

Sekretaris Tim : Sekretaris Dinas / pejabat lainnya

Kelompok Kerja : Susunan kelompok kerja tim disesuaikan dengan kebutuhan, yang diketuai oleh kepala unit kerja dengan anggota pejabat/staf PD dan unsur non pemerintah yang dinilai kompeten sebagai tenaga ahli.

1.2. Orientasi mengenai Renstra PD

Orientasi mengenai Renstra PD kepada seluruh anggota tim perlu dilakukan, untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renstra PD, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra PD. Bahan orientasi mengenai Renstra PD, mencakup:

1) Peraturan perundang-undangan, antara lain: tentang keuangan negara, sistem perencanaan pembangunan nasional, pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana penyelenggaraan daerah, dan tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2) Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan Renstra PD dan penyusunan anggaran.

3) Buku-buku literatur tentang perencanaan dan penganggaran.

1.3. Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra PD

Rencana kegiatan tim penyusun Renstra PD disusun kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari persiapan surat edaran hingga verifikasi rancangan Renstra PD sebagai bahan musrenbang. Agenda kerja ini juga membantu koordinasi dan integrasi antara proses penyusunan Renstra PD dengan penyusunan RPJMD.

1.4. Pengumpulan Data dan Informasi

Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen rencana pembangunan daerah yang disusun. Untuk itu, dalam penyusunan Renstra PD perlu dikumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan relevan serta dapat dipertanggungjawabkan. Pengumpulan data dan informasi tersebut dilakukan dengan langkah-langkah, sebagai berikut:

1) Penyusunan Renstra PD dan disajikan dalam bentuk matrik (check list) untuk memudahkan analisis;
2) Mengumpulan data/informasi yang akurat dari sumber sumber yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
3) Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis. Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang perlu dikumpulkan dalam menyusun Renstra PD, antara lain:
    1) Peraturan perundang-undangan yang terkait;
    2) Kebijakan pemerintah yang terkait;
    3) Dokumen-dokumen:
        a. RPJMD provinsi, RTRW provinsi, dan Renstra K/L untuk penyusunan RPJMD provinsi;
        b. RPJMD kabupaten/kota, RTRW kabupaten/kota, RPJMD provinsi, dan Renstra K/L untuk penyusunan RPJMD kabupaten/kota;
        c. Hasil evaluasi Renstra PD periode lalu;

Data statistik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir. Jenis data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun dokumen Renstra PD antara lain sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017.

1.1.2.2 Penyusunan Rancangan Renstra PD

Tahap penyusunan rancangan Renstra PD terdiri dari dua tahap, yaitu:

2.1. Tahap perumusan rancangan Renstra PD; dan

2.2. Tahap penyajian rancangan Renstra PD.

2.1. Tahap Perumusan Rancangan Renstra PD

Perumusan isi dan substansi rancangan Renstra PD sangat menentukan kualitas dokumen Renstra PD yang akan dihasilkan. Salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra PD adalah Rancangan Awal RPJMD yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh PD selama lima tahun, baik untuk mendukung visi/misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi PD terkait.

Dokumentasi perumusan dan keseluruhan tahap perencanaan pembangunan daerah daerah dijadikan sebagai kertas kerja (working paper). Suatu kertas kerja perumusan dan keseluruhan tahap penyusunan Renstra PD merupakan dokumen yang tak terpisah dan dijadikan sebagai dasar penyajian (dokumen) Renstra PD.

Kegiatan-kegiatan perumusan rancangan Renstra PD yang dilakukan secara simultan (bersamaan waktunya) dengan proses penyusunan RPJMD terdiri dari:

1. Pengolahan data dan informasi
    a) data dan informasi gambaran pelayanan PD; mencakup (1) struktur organisasi beserta tugas dan fungsinya sebagai dasar untuk melihat dan menentukan lingkup kewenangan PD, (2) data dan informasi yang menggambarkan pencapaian-pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra PD periode sebelumnya, (3) data dan informasi yang menunjukkan aspirasi-aspirasi

masyarakat terkait pemenuhan kebutuhan barang publik, layanan publik, dan regulasi dalam lingkup kewenangan PD.

b) data dan informasi pengelolaan pendanaan pelayanan PD: mencakup (1) data pendapatan PD, (2) data belanja PD, (3) data pembiayaan PD (khusus Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/SKPKD).

2. Analisis gambaran pelayanan PD, terdiri dari:
   a) analisis gambaran umum pelayanan PD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pelayanan PD.
   b) analisis pengelolaan pendanaan pelayanan PD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan PD.
3. *Review* Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra PD Untuk penyusunan rancangan Renstra PD provinsi, dilakukan review Renstra K/L dan Renstra PD kabupaten/kota, yang mencakup:
   a) tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L;
   b) program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas;
   c) tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra PD kabupaten/kota; dan
   d) program prioritas PD kabupaten/kota dan target kinerja serta lokasi program prioritas.

Untuk penyusunan rancangan Renstra PD kabupaten/ kota, dilakukan review Renstra K/L dan Renstra PD provinsi, yang mencakup:

a) tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L;
b) program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas;
c) tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra PD Provinsi; dan

d) program prioritas PD provinsi dan target kinerja serta lokasi program prioritas.

4. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), mencakup:
   a) tujuan dan sasaran RTRW;
   b) truktur dan pola ruang; dan
   c) indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.
5. Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan atau tugas dan fungsi PD.
6. Perumusan isu-isu strategis berdasarkan:
   a) Hasil analisis gambaran pelayanan PD (potensi dan permasalahan pelayanan PD);
   b) Hasil review Renstra K/L dan Renstra PD kabupaten/kota untuk penyusunan Renstra PD provinsi dan hasil review Renstra K/L dan Renstra PD provinsi untuk penyusunan Renstra PD kabupaten/kota;
   c) Hasil penelaahan RTRW;
   d) Hasil analisis dokumen KLHS; dan
   e) Penentuan isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra PD berdasarkan huruf a), huruf b), huruf c), dan huruf d).
7. Perumusan visi dan misi PD;
8. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah PD; dan
9. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah PD.

Sedangkan kegiatan yang dilakukan setelah PD menerima surat edaran kepala daerah perihal penyusunan rancangan Renstra PD adalah:

a. Mempelajari surat edaran kepala daerah perihal penyusunan rancangan Renstra PD beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-PD;
b. Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah PD guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi PD;

c. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan berdasarkan rencana program prioritas RPJMD;
d. Perumusan indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD; dan
e. Pelaksanaan forum PD.

2.2 Tahap Penyajian Rancangan Renstra PD

Hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan perumusan rancangan Renstra PD yang telah diuraikan sebelumnya, disusun secara sistematis kedalam naskah rancangan Renstra PD

1.1.3 Keterkaitan Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dokumen Renstra PD merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang perencanaan pembangunan nasional, maka seharusnya Renstra PD merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016-2021. Adapun gambaran tentang hubungan Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan.

Penyusunan dokumen RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021 harus memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan mengacu pada Dokumen RPJM Provinsi Bali. Sehingga RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016-2021 dapat menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah, yaitu Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2016-2021 serta dapat menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen tahunan Perangkat Daerah yaitu Rencana Kerja PD.

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra- PD) tahun 2016-2021 dilaksanakan dengan melakukan penyusunan Rancangan Rencana Strategis yang digunakan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016- 2021. Dokumen Renstra ini juga harus memperhatikan keselarasan dengan dokumen-dokumen lainnya antara lain

RPJMN, RTRW, Renstra Provinsi, Renstra Kementerian/Lembaga, dsb. Dokumen Renstra PD, nantinya akan digunakan sebagai acuan bagi PD dalam melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang nantinya akan dilaksanakan oleh PD selama satu tahun dan kemudian akan diteruskan dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai acuan kegiatan dan anggaran pelaksanaan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (5) dan ayat (6);
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465;
3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6380);
11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19);

14) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82);
15) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 Tahun 2019);
19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota

Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1;

23) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 27);
24) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
25) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026;
26) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas; dan
27) Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor 903/379/Bappeda/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Renstra Dinas Perhubungan Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026 adalah menjabarkan seluruh Program yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu lima tahun sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Denpasar selaras dengan yang diamanatkan dalam RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021 - 2026. Rencana Strategis berisi rumusan langkah – langkah strategis untuk mencapai hasil yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 2021 sampai dengan tahun 2026 dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang mungkin dihadapi/terjadi.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra adalah untuk memberikan acuan penyelenggaraan pemerintahan / pembangunan sesuai amanat RPJMD yang

berada dalam lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Denpasar, yaitu :

1. Menetapkan arah dan strategi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Perhubungan Kota Denpasar selama lima tahun ke depan dengan mengacu RPJMD Kota Denpasar;
2. Menetapkan program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
3. Menetapkan sasaran maupun target-target pembangunan dengan indikator yang terukur;
4. Menjamin konsistensi antara perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan komiten yang telah disepakati;
5. Sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan instrumen pertanggungjawaban.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II
GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai yang diamanatkan oleh yang dijabarkan dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar, bahwa tugas pokok Dinas Perhubungan Kota Denpasar adalah : "Melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Perhubungan"

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Perhubungan kota Denpasar mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan.
b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Perhubungan.
d. Pengelolaan urusan ketatausahaan.

Dinas Perhubungan Kota Denpasar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, dengan dibantu oleh seorang Sekretaris, tiga Sub Bagian, Empat Bidang yang membawahi tiga Seksi, tiga Unit Pelaksana Teknis, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun susunan organisasinya sebagai berikut :

1. Unsur-unsur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Denpasar terdiri dari:
   a) Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas
   b) Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris Dinas
   c) Unsur Pelaksana adalah Kepala Bidang, Sub Bagian, Kepala Seksi, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional
2. Susunan Organisai Dinas terdiri dari:
   A. Kepala Dinas
   B. Sekretariat membawahi:
      1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
      2) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
      3) Sub Bagian Keuangan

C. Bidang Prasarana Transportasi membawahi:

1) Seksi Pembangunan Prasarana
2) Seksi Pengembangan Teknologi Prasarana Transportasi
3) Seksi Pengembangan Prasarana Uji

D. Bidang Lalu Lintas membawahi:

1) Seksi Manajemen Lalu Lintas
2) Seksi Penerangan Jalan Umum
3) Seksi Rekayasa Lalu lintas

E. Bidang Angkutan membawahi:

1) Seksi Angkutan Orang
2) Seksi Angkutan Barang
3) Seksi Angkutan Multimoda

F. Bidang Pengendalian dan Operasional membawahi:

1) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Keselamatan
2) Seksi Penegakan Hukum
3) Seksi Patroli dan Inspeksi Keselamatan

G. Unit Pelaksana Teknis (UPT):

1) UPT Terminal Penumpang
2) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
3) UPT Pelayanan Transportasi Darat

H. Kelompok Jabatan Fungsional

Sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 23 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar, berikut ini adalah tugas yang dibebankan kepada unsur organisasi Dinas Perhubungan Kota Denpasar yang terdiri dari :

A. Kepala Dinas yang mempunyai tugas:

- Menetapkan program kerja Dinas Perhubungan berdasarkan Rencana Strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perhubungan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;

- membina bawahan di lingkungan Dinas Perhubungan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan, dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- membuat perumusan kebijakan teknis Bidang Perhubungan berdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- menyelenggarakan pelayanan umum dan urusan Perhubungan yang meliputi Bidang Bina Program, Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Pengendalian dan Operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya keselamatan dan ketertiban lalu lintas;
- memberikan pelayanan rekomendasi perizinan di Bidang Perhubungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi perizinan;
- memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- melaksanakan pembinaan kesekretariatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Perhubungan dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
- menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perhubungan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan

- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

B. Sekretariat Dinas

Dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris Dinas mempunyai tugas:

- menyusun rencana operasional Sekretariat berdasarkan rencana program Dinas Perhubungan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan tugas – tugas Bidang serta memberikan pelayanan administrasi sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai;
- mengkoordinasikan, menghimpun dan menyusun Perencanaan dan Evaluasi kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- mengkoordinasikan penyusunan laporan kegiatan dan kinerja Dinas sesuai prosedur yang berlaku sebagai bahan laporan pertanggungjawaban;

- melaksanakan urusan Kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
- melaksanakan urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga sesuai peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- melaksanakan urusan Keuangan sesuai peraturan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi keuangan;
- mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Dinas dibantu oleh para Kepala Sub Bagian. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.

C. Bidang Prasarana Transportasi mempunyai tugas :

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan. Kepala Bidang Prasarana Transportasi mempunyai tugas:

- Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Prasarana Transportasi berdasarkan rencana program Dinas Perhubungan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Prasarana Transportasi sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien

- Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Prasarana Transportasi sesuai Peraturan Perundang- undangan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas
- Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Prasarana Transportasi secara berkala sesuai dengan Peraturan Perundangundangan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan
- Merumuskan kebijakan teknis mengenai pembangunan prasarana transportasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya tertib dan keselamatan berkendara
- Merumuskan kebijakan teknis mengenai pengembangan dan penerapan sistem informasi dan teknologi transportasi yang tepat guna sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku agar tercipta kelancaran informasi dan teknologi yang tepat guna
- Merumuskan kebijakan teknis mengenai pengembangan prasarana uji sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku agar terciptanya kelancaran dan ketertiban di dalam pelayanan transportasi
- Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada kepala seksi sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku demi terciptanya pelayanan yang optimal di lingkungan Dinas Perhubungan
- Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik internal maupun eksternal sesuai dengan prosedur serta kegiatan yang dilaksanakan agar lancarnya pelaksanaan tugas di bidang prasarana transportasi
- Menilai prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan
- Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Prasarana Transportasi dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas

tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang

- Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Prasarana Transportasi sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Prasarana Transportasi
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Prasarana Transportasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui Sekretaris.

D. Bidang Lalu Lintas

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan. Kepala Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas:

- menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Lalu Lintas berdasarkan rencana program Dinas Perhubungan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Lalu Lintas sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Lalu Lintas sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Lalu Lintas secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- menyiapkan perencanaan,pembinaan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas dalam Bidang Perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya keselamatan dan tertib lalu lintas;

- menyusun dan merencanakan jaringan jalan di wilayah Kota berdasarkan kebutuhan masyarakat untuk peningkatan pelayanan masyarakat;
- menyiapkan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, monitoring, pengawasan dan pembinaan sarana prasarana perlengkapan jalan untuk keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- melaksanakan analisis dampak lalu lintas pada jaringan jalan dalam wilayah Kota berdasarkan kewenangan agar wilayah Kota Denpasar terhindar dari dampak kemacetan lalu intas;
- mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Lalu Lintas dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Lalu Lintas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Lalu Lintas; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui Sekretaris.

E. Bidang Angkutan

Bidang Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.
Kepala Bidang Angkutan mempunyai tugas sebagai berikut:

- menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Angkutan berdasarkan rencana program Dinas Perhubungan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Angkutan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang

ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;

- memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Angkutan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Angkutan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- melaksanakan pembinaan penyelenggaraan angkutan dan memberikan rekomendasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar pengusaha angkutan taat terhadap peraturan;
- menyelenggarakan pembangunan fasilitas terminal dan pelabuhan berdasarkan kebutuhan masyarakat agar pelayanan transportasi lancar, aman, tertib dan terjangkau;
- mengatur dan menyiapkan penyediaan moda angkutan di Bidang Perhubungan sesuai kebutuhan masyarakat untuk memenuhi pelayanan angkutan yang berkualitas;
- merencanakan dan menyusun tarif angkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tingkat kemampuan masyarakat agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat antara pengusaha angkutan;
- memberikan pelayanan rekomendasi angkutan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku agar pengawasan dan pengendalian terhadap pengusaha angkutan lebih efektif;
- melaksanakan perencanaan, pengusulan dan penetapan serta evaluasi pengembangan jaringan trayek dan lintas angkutan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- melakukan pemantauan dan pengumpulan data kinerja angkutan di Bidang Perhubungan secara periodik sebagai bahan perencanaan kegiatan;

- mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Angkutan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Angkutan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Angkutan; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui Sekretaris.

F. Bidang Pengendalian dan Operasional

Bidang Pengendalian dan Operasional dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan. Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional mempunyai tugas sebagai berikut :

- menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pengendalian Operasional berdasarkan rencana program Dinas Perhubungan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Pengendalian Operasional sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Pengendalian Operasional sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengendalian Operasional secara berkala sesuai dengan peraturan

dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

- mengumpulkan, mengolah data dan lokasi serta program penanggulangan kecelakaan di Bidang Perhubungan secara periodik berdasarkan investigasi lapangan sebagai perencanaan kegiatan yang akan datang;
- melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas secara periodik berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku agar sesuai dengan peruntukannya;
- menyiapkan dan melaksanakan program pengendalian dan pengawasan di Bidang Perhubungan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang berlaku untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
- melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan secara berkelanjutan melalui rapat koordinasi agar tercipta kepastian pelayanan;
- memantau pelaksanaan analisa dampak alu lintas di lapangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan;
- mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Operasional dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Operasional sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Pengendalian dan Operasional; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Pengendalian Operasional dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui Sekretaris.

G. Unit Pelaksana Teknis Terminal Penumpang

Dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Unit dibantu oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

H. Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor

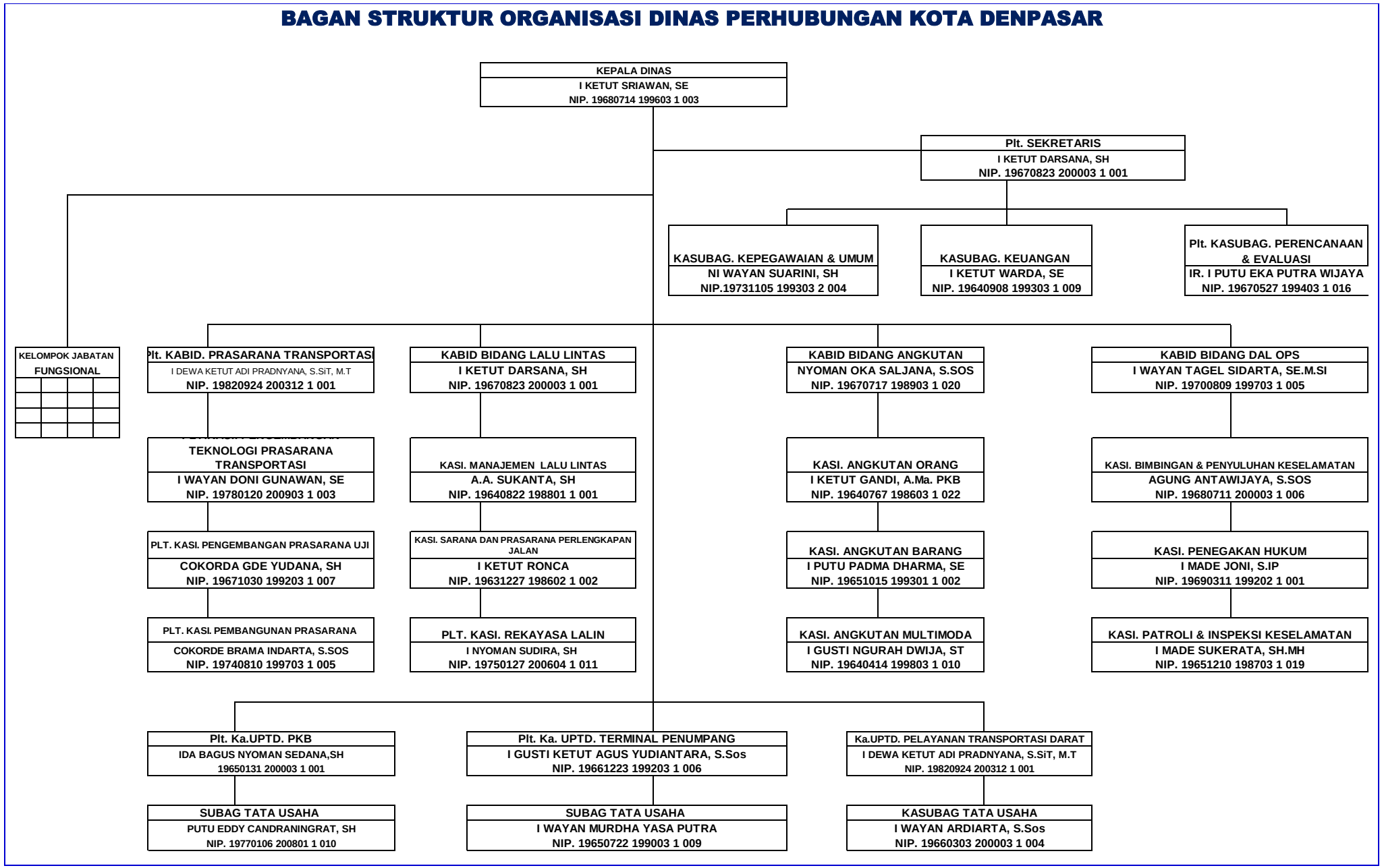
UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Unit dibantu oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

I. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Transportasi Darat

UPT Pelayanan Transportasi Darat dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Unit dibantu oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

J. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam perkembangannya Dinas Perhubungan akan melakukan ekspansi organisasi dengan mengikuti perkembangan Kota Denpasar yang semakin pesat. Akibat perkembangan Kota Denpasar Dinas Perhubungan akan melakukan ekspansi seperti pengembangan pengelolaan angkutan massal dan pengelolaan sistem informasi Transportasi berbasis Teknologi Informasi. Struktur organisasi saat ini dan yang akan datang adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Denpasar

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah Aparatur Dinas Perhubungan Kota Denpasar pada tahun 2021 seluruhnya sebanyak 609 orang. Menurut jenjang pendidikan lebih dari 50% tamatan SLTA, sedangkan menurut status kepegawaian lebih dari 60% merupakan tenaga SPK, dan hanya 8.14% dari seluruh pegawai yang ada memenuhi kualifikasi keahlian teknis sebagaimana disajikan pada tabel-tabel berikut:

Tabel 2.1

Komposisi Pegawai Menurut Golongan Tahun 2021

No.	Golongan	Jumlah	%
1	Golongan I	10	1.64
2	Golongan II	57	9.35
3	Golongan III	63	10.34
4	Golongan IV	5	0.82
5	Tenaga Kontrak	474	77.85
	Jumlah	609	100

Tabel 2.2

Komposisi Pegawai Menurut Eselon Tahun 2021

No.	Eselon	Jumlah	%
1	Eselon II	1	4.55
2	Eselon III	3	13.63
3	Eselon IV	18	81.82
	Jumlah	22	100

Tabel 2.3

Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2021

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	%
1	Strata 2	8	1.31
2	Strata 1	225	36.95
3	Sarjana Muda / Diploma 3	14	2.30
4	Diploma 2	20	3,28
5	Diploma 1	7	1.15
6	SLTA / Sederajat	311	51.07
7	SLTP / Sederajat	12	1.97
8	SD	12	1.97
Jumlah		609	100

Tabel 2.4

Komposisi Pegawai Menurut Status Kepegawaian Tahun 2021

No.	Status Kepegawaian	Jumlah	%
1	Pegawai Negeri Sipil	135	22.17
2	Tenaga Kontrak	474	77.83
Jumlah		609	100

Tabel 2.5

Jumlah Pegawai Kualifikasi Diklat Teknis Tahun 2021

No.	Kualifikasi	Jumlah
1	Diklat Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan II	9
2	Diklat Penguji Kendaraan Bermotor Pemula/Dasar	2
3	Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	4
4	Pelatihan Teknik Traffic Light	3
5	Bimtek Area Traffic Control System (ATCS)	2
6	Diklat Manajemen Terminal Angkutan Jalan	2

7	Diklat Keselamatan Transportasi	1
8	Diklat Transportasi Perkotaan	1
9	Diklat Peliharaan dan Perawatan Alat Uji	1
10	Bimtek di Bidang Laik Fungsi Jalan	1
11	Emisi Gas Buang	1
12	Diklat Inspeksi Keselamatan LLAJ	1
13	Analisis Dampak Lalu Lintas	2
14	Bimtek Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual	2
15	Pelatihan Fungsional Analisis Kepegawaian Keahlian	1
16	Bimtek Kearsipan	1
17	Bimtek Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan	1
18	Diklat Dasar-Dasar Perencanaan	2
Jumlah		37

Tabel. 2.6

Jumlah Pegawai Diklat Penjenjangan tahun 2021

No.	Diklat Penjenjangan	Jumlah
1	Diklat Pim IV	**13**
2	Diklat Pim III	**4**
3	Diklat Pim II	**0**

2.2.2 Aset/Modal

Tabel 2.7

Aset Dinas Tahun 2021

No	Asset	Jumlah Satuan	Keadaan
1	**Perlengkapan Barang Bergerak**		
	• Roda 4	26	Baik
	• Roda 2	69	Baik, 2 rusak
	• Bus Sekolah	14	Baik

2	**Perlengkapan Barang Tidak Bergerak**			
	•	Tanah	6 Lokasi = 62.367 m^2	Baik = 30
	•	Bangunan	51	Kurang Baik = 22
3	**Perlengkapan Barang Elektronik**			
	•	Radio Komunikasi (HT)	141	Baik
	•	Televisi	23	Baik
	•	Komputer Portable	73	Baik
	•	Laptop / Notebook	31	Baik
	•	Printer	92	Baik, rusak 1
	•	Sound System	5	Baik
4	**Perlengkapan Kantor**			
	•	Meja	300	Baik
	•	Kursi	570	Baik
5	**Perlengkapan Alat Uji**			
	•	Brake Tester	2	Baik
	•	Smoke Tester	3	Baik
	•	Air Compresor	3	Baik
	•	Side Slip Tester	2	Baik
	•	Speedo Meter Tester	2	Baik / 1 Tidak Baik
	•	Head Light Tester	3	Baik
	•	Diesel Generator Set	2	Baik / 1 Tidak Baik
	•	Bensin Generator Set	1	Baik
	•	Sound Level Tester	3	Baik

	•	Gas Analyzer	3	Baik / 1 Kurang Baik
	•	Window Tint Meter	2	Baik
	•	Brake Tester Portable	3	Baik
	•	Alat Timbang Portable	1	Baik
	•	Ply Ditector	2	Baik / 1 Kurang Baik
6	**Perlengkapan Lalu Lintas**			
	•	Rambu-Rambu	3351 Bh	Baik
	•	Cermin Tikungan	140 Bh	Baik
	•	Gijardrail	1514 Mtr	Baik
	•	Delinitor	690 Bh	Baik
	•	Paku Marka	1755 Bh	Baik
	•	Ruang Henti Khusus	35 Lokasi	Baik
	•	Zona Selamat Sekolah	38 Lokasi	Baik
	•	Zebra Cross	396 Lokasi	Baik
	•	Warning Light	22 Unit	Baik
	•	Traffic Light	36 Unit	Baik
	•	Pelican Crossing	10 Unit	Baik
	•	Running Text	4 Unit	Baik

	•	VMS	2 Unit	Baik
	•	Yellow Box Junction	31 Lokasi	Baik
	•	Marka Parkir Disabilitas	13 Lokasi	Baik
	•	Marka Jalan yang Dipelihara	2983 M^2	Baik
	•	Marka Kejut (Pita Penggaduh)	72 Lokasi	Baik
	•	LPJU	18.187	Baik
7	**Sistem Kendali Persimpangan (ATCS)**			
	•	APILL ATCS	51 Simpang	Baik
	•	APILL Non ATCS	15 Simpang	Baik
	•	Jaringan Fiber Optik	35,4 Km	Baik
	•	VMS	5 Unit	Baik
	•	Info Display	16 Unit	Baik
	•	Radar Ditector	8 Unit	Baik
	•	Kamera Pantau (CCTV)	117 Unit	Baik

Tabel 2.8

Terminal di Kota Denpasar tahun 2021

No	Nama Terminal	Jenis Terminal
1	TERMINAL UBUNG	Terminal Penumpang Tipe C
2	TERMINAL KERENENG	Terminal Penumpang Tipe C
3	TERMINAL TEGAL	Terminal Penumpang Tipe C
4	TERMINAL WANGAYA	Terminal Penumpang Tipe C

Tabel 2.9

Pelabuhan di Kota Denpasar tahun 2021

No	Nama Pelabuhan	Jenis Pelabuhan
1	Pelabuhan Sanur	Pengumpan Lokal
2	Pelabuhan Serangan	Pengumpan Lokal
3	Dermaga Mertasari	Pengumpan Lokal
4	Dermaga Kodang Pamelisan	Pengumpan Lokal

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Denpasar

Kinerja pelayanan ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Denpasar berdasarkan sasaran / target renstra Dinas Perhubungan periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan / atau indikator kinerja pelayanan Dinas Perhubungan dan / atau indicator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Berdasarkan capaian indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan selama 5 tahun (mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021), yang dapat dilihat pada Tabel 2.10

Tabel 2.10

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Kota Denpasar Tahun 2017 - 2021

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase kebutuhan prasarana transportasi		Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas yang terpasang		65%	70%	75%	80%	85%	70%	96%	72%	58%	0%	108%	137%	96%	73%	0%
2	Load factor angkutan umum				21%	22%	23%	24%	25%	34%	24%	23%	36%	0%	162%	109%	100%	150%	0%
3	Indek kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sistem transportasi darat		Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Perhubungan		68	72	76	80	84	76.34	78.34	78.74	87	0	112%	109%	104%	109%	0%
4	Penurunan jumlah angka kecelakaan				420	400	300	360	340	378	366	401	339	0	90%	92%	134%	94%	0%
5	Jumlah penurunan angka pelanggaran LLAJ				2400	2160	1944	1750	1575	2160	1944	5187	7146	0	90%	90%	267%	408%	0%

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.11

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Denpasar

No	uraian	Anggaran Pada Tahun				Realisasi Anggaran Pada Tahun				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	**Pelayanan Administrasi Perkantoran**														
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	17,594,709,310.00	21,637,604,617	33,106,111,775	43,974,789,868	16,254,185,555.00	13,527,192,736	31,202,491,891	30,718,521,134	92%	63%	94%	70%	29,078,303,892.48	22,925,597,829.00
2	**Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**														
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,415,444,000.00	2,024,380,333	1,982,688,200	1,566,487,840	1,904,398,802.00	1,639,175,900	1,511,250,800	1,213,173,570	79%	81%	76%	77%	1,997,250,093.25	1,566,999,768.00
3	**Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**														
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	44,000,000.00	75,000,000	267,000,000	-	30,318,891.00	44,281,400	127,385,052	-	69%	59%	48%	0%	96,500,000.00	50,496,335.75
4	**Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan**														

1	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan serta Evaluasi Kinerja	399,441,430.00	-	-	-	386,957,800.00	-	-	-	97%	0%	0%	0%	99,860,357.50	96,739,450.00
2	Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan	-	485,918,800.00	1,045,515,050	21,045,200	-	481,968,610.00	963,825,397	18,281,600	0%	0%	0%	0%	388,119,762.50	366,018,901.75
3	Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan	-	104,268,800.00	-	-	-	95,306,010.00	-	-	0%	0%	0%	0%	26,067,200.00	23,826,502.50
4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	85,360,550.00	382,549,970	140,368,350	-	83,367,860.00	363,807,150	136,717,150	0%	0%	0%	0%	152,069,717.50	145,973,040.00
5	**Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ**														
1	Pengadaan dan Pemasangan RPPJ, Guardrail dan Warning Light Serta Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat	60,190,700.00	-	-	-	55,317,750.00	-	-	-	92%	0%	0%	0%	15,047,675.00	13,829,437.50
2	Operasional Lalu Lintas	1,841,264,150.00	1,930,303,500.00	1,653,546,441	633,557,850	1,498,360,037.00	1,814,290,810.00	1,584,045,438	613,987,260	81%	94%	96%	97%	1,514,667,985.25	1,377,670,886.25
3	Penyediaan Fasilitas Lalu Lintas	1,576,768,450.00	267,796,350.00	763,569,700	51,781,700	1,011,970,000.00	228,593,960.00	742,456,100	50,700,400	64%	85%	97%	98%	664,979,050.00	508,430,115.00

4	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Lampu Taman/Hias Di Kota Denpasar	24,075,644,740.00	21,545,652,000.00	4,689,708,500	4,175,272,200	21,730,984,025.00	19,105,162,067.00	4,014,677,060	3,850,089,690	90%	89%	86%	92%	13,621,569,360.00	12,175,228,210.50
5	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	455,000,000.00	2,954,000,000.00	1,267,417,811	1,344,316,500	221,572,300.00	1,868,832,000.00	590,161,722	924,405,101	49%	63%	47%	69%	1,505,183,577.75	901,242,780.63
6	**Peningkatan Pelayanan Angkutan**														
	Pengembangan Sarana dan Prasarana pelayanan jasa angkutan	114,023,000.00	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	28,505,750.00	-
1	Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudik/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	252,029,400.00	203,037,500	245,430,600	16,212,200	211,825,550.00	175,804,705	212,924,800	13,959,700	84%	87%	87%	86%	179,177,425.00	153,628,688.75
2	Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Lebaran	178,663,500.00	203,692,380	187,130,510	35,265,100	161,825,760.00	188,587,620	173,605,875	34,295,750	91%	93%	93%	97%	151,187,872.50	139,578,751.25
3	Operasional Pelayanan Transportasi Darat	1,952,051,000.00	721,963,300	1,729,828,300	635,704,300	1,827,379,100.00	611,964,400	1,609,302,965	625,644,460	94%	85%	93%	98%	1,259,886,725.00	1,168,572,731.25
4	Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Natal, Denpasar Festival dan Tahun Baru	124,065,600.00	105,500,000	178,198,100	32,466,500	121,336,000.00	104,718,000	169,051,950	30,384,300	98%	99%	95%	94%	110,057,550.00	106,372,562.50

5	Peran Serta Lomba Tertib Lalu Lintas Wahana Tata Nugraha	154,800,000.00	-	-	-	139,613,600.00	-	-	-	90%	0%	0%	0%	38,700,000.00	34,903,400.00
6	Operasional Pelayanan Terminal Penumpang	200,000,000.00	207,553,000	386,319,800	333,686,650	184,069,150.00	198,277,040	369,216,465	328,066,280	92%	96%	96%	98%	281,889,862.50	269,907,233.75
7	Operasional Pelayanan UPT PKB	443,000,800.00	1,174,768,700	1,552,940,375	1,546,508,750	380,183,300.00	986,339,631	1,249,240,514	1,506,372,250	86%	84%	80%	97%	1,179,304,656.25	1,030,533,923.75
8	Operasional Pelayanan Terminal Barang	196,800,000.00	133,000,850	172,962,100	70,549,200	183,002,500.00	118,910,330	101,521,375	70,479,700	93%	89%	59%	100 %	143,328,037.50	118,478,476.25
9	Penyelenggaraan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Denpasar	128,787,160.00	76,648,160	75,204,130	8,131,010,000	109,532,200.00	38,768,965	66,949,350	3,934,601,850	85%	51%	89%	48%	2,102,912,362.50	1,037,463,091.25
10	Pelaksaaan Program Aksi Keselamatan Jalan	160,213,050.00	261,728,000	244,896,250	5,776,000	143,673,500.00	229,440,180	227,159,150	5,038,700	90%	88%	93%	87%	168,153,325.00	151,327,882.50
11	Penyediaan Layanan Angkutan Sekolah	5,534,098,250.00	3,091,872,000	2,206,311,510	1,046,062,734	4,666,027,760.00	2,585,465,168	1,871,111,801	683,195,282	84%	84%	85%	65%	2,969,586,123.50	2,451,450,002.75
12	Penyediaan Layanan Angkutan Perkotaan	-	-	-	718,405,276	-	-	-	613,871,070	0%	0%	0%	85%	179,601,319.00	153,467,767.50
7	**Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas**														
1	Pengendalian Operasional, Pengamanan dan Penertiban LLAJ	837,046,890.00	791,511,290	1,055,295,370	445,410,000	825,022,450.00	748,681,680	992,228,595	443,641,800	99%	95%	94%	100 %	782,315,887.50	752,393,631.25

2	Kajian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di Kota Denpasar	368,813,690.00	-	-	-	367,156,690.00	-	-	-	100%	0%	0%	0%	92,203,422.50	91,789,172.50
8	**Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor**														
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	1,073,846,430.00	-	-	-	856,122,992.00	-	-	-	80%	0%	0%	0%	268,461,607.50	214,030,748.00
2	Operasional Pelayanan Mobil Pengujian Kendaraan Bermotor Keliling	176,153,570.00	136,013,570	151,633,470	55,408,660	132,652,040.00	107,948,690	133,196,000	40,474,300	75%	79%	88%	73%	129,802,317.50	103,567,757.50
9	**Peningkatan Pelayanan Angkutan Kendaraan Tidak Bermotor**														
1	Optimalisasi Kegiatan Car Free Day di Kota Denpasar	171,800,350.00	147,295,150	123,040,750	53,828,600	169,307,500.00	142,816,835	99,962,110	53,501,150	99%	97%	81%	99%	123,991,212.50	116,396,898.75

Pada Tabel 2.11 dapat dilihat perbandingan hasil *review* anggaran dinas perhubungan kota denpasar pada tahun 2017-2020 dapat dilihat terdapat penurunan anggaran dari tahun 2018 dan tahun 2019 sebesar 4% dan 8%. Hal ini diakibatkan adanya beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan karena kurang relevan dilaksanakan pada tahun berkenaan. Tentunya hal ini berbanding terbalik pada tahun 2020 yang mana terdapat peningkatan anggaran sebesar 122% dari tahun sebelumnya diakibatkan beberapa kegiatan sebagai penunjang penanganan pandemi *covid-19* yang melanda Kota Denpasar.

Jika dilihat dari realisasi penggunaan anggaran setiap tahun Dinas Perhubungan Kota Denpasar dari tahun 2017-2020 tidak mencapai sesuai target anggaran hal ini dikarenakan Dinas Perhubungan melakukan beberapa efesiensi dan *refocusing* kegiatan, adapun capaian dari tahun 2017 sebesar 89%, Tahun 2018 sebesar 77%, Tahun 2019 sebesar 90% dan Tahun 2020 Sebesar 71 %. Jika dilihat dari keseluruhan anggaran dan realisasi rata-rata pengguanaan anggaran atau realisasi Dinas Perhubungan Kota Denpasar adalah sebesar 81% tentunya hal ini menjadi tolak ukur keberhasilan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan efisiensi dan *refocusing* kegiatan dan anggaran setiap tahunnya

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan maupun tantangan yang dihadapi Kota Denpasar meliputi permasalahan dan tantangan terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur wilayah, pemerintahan, keamanan wilayah, lingkungan hidup yang berkelanjutan, serta daya saing ekonomi daerah, sehingga diperlukan skala prioritas penanganan permasalahan. Perumusan permasalahan dilakukan dengan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja pembangunan daerah dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah.

Dari sektor transportasi Kota Denpasar memiliki tantangan di Transportasi darat yakni semakin tingginya penggunaan kendaran pribadi dijalan yang mengakibatkan bertambahnya titik kemacetan di beberapa ruas jalan diperlukan kehadiran pemerintah untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dijalan dengan strategi meningkatkan persentase penggunaan angkutan umum di jalan. Kemacetan di jalan selain menimbulkan kerugian pengguna jalan juga berdampak secara makro antara lain akan menyebabkan pemborosan energi, dapat menurunkan aksesibilitas masyarakat dan kenyamanan kota akan menurun.

Pemerintah pusat sangat berpihak terhadap penyelenggaraan transportasi di daerah dengan adanya dukungan regulasi dan berbagai bantuan teknis dari pemerintah pusat dalam mengembangkan sistem angkutan umum di Kota Denpasar menjadikan peluang dalam merencanakan sistem transportasi perkotaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kota Denpasar.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

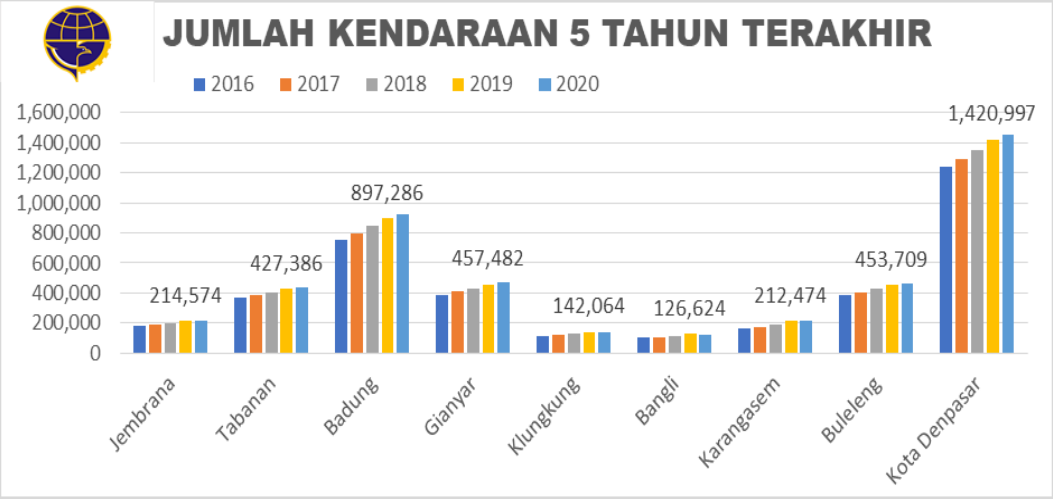
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.1.1 Isu Strategis Perkotaan

Kota Denpasar merupakan Ibukota dari Provinsi Bali dengan luasan mencapai 127,78 meter persegi. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk (Badan Pusat Statistik Kota Denpasar, 2021) penduduk Kota Denpasar pada tahun 2020 berjumlah 962.900 jiwa yang terdiri dari 491.500 penduduk laki-laki (50,02%) dan 471.400 penduduk perempuan (49,97%) dengan kepadatan penduduk 5.099,40/km^2. Kota Denpasar berkembang sebagai pusat dari berbagai macam kegiatan, baik di bidang pendidikan, pemerintahan, perdagangan, maupun pariwisata di Provinsi Bali. Kondisi tersebut akan meningkatkan minat penduduk di luar Kota Denpasar sendiri maupun penduduk di luar pulau Bali untuk datang sebagai wisatawan maupun dalam rangka mencari lapangan pekerjaan. Selain itu peningkatan jumlah penduduk terutama akibat arus urbanisasi akan berdampak positif terhadap aktivitas perekonomian di Kota Denpasar namun disisi lain akan mengakibatkan kian meningkatnya permasalahan transportasi, dimana ketersediaan sarana dan prasarana transportasi tidak seimbang dengan kebutuhan akan jasa transportasi yang ada sehingga menyebabkan timbulnya kemacetan di pusat-pusat kegiatan. Perkembangan wilayah Kota Denpasar tidak bisa lepas dengan pertumbuhan daerah penyangga di sekitar Kota Denpasar seperti di Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar. Kedua kabupaten tetangga itu mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi yang sangat baik, sehuingga wilayah Kota Denpasar yang berbatasan langgsung dengan Kabupaten Tabanan dan Gianyar semakin berkembang menjadi pusat–pusat kegiatan baru.

Pertumbuhan jumlah kendaraan di Provinsi Bali masih didominasi di Kota Denpasar, kondisi ini ditunjukkan pada Gambar 3.1 dimana kota Denpasar memilki jumlah kepemilikan kendaraan tertinggi di Bali dan 30% lebih kendaraan berada di Kota Denpasar. Dari data tersebut sudah menunjukkan bahwa

kemacetan akan semakin banyak terjadi di wilayah Kota Denpasar jika sistem transportasi perkotaan tidak dikelola dengan baik.



Gambar 3.1
Grafik Jumlah Kendaraan Pada Kab/Kota Di Provinsi Bali Periode 5 Tahun Terakhir

Ketidakseimbangan antar *supply* dan *demand* akan semakin terjadi jika pemerintah tidak hadir dalam mengatasi permsalahan tersebut terlebih lagi di Kota Denpasar sudah tidak memungkinkan untuk membangun jalan baru sehingga skenario yang sangat logis dilakukan adalah mengembangkan sistem angkutan umum perkotaan yang terintegrasi. Memperhatikan dari uraian di atas yang berkaitan dengan permasalahan Transportasi di Kota Denpasar, didapat beberapa isu – isu strategis permasalahan Transportasi perkotaan diantarnya:

1. Masih rendahnya penggunaan angkutan umum di Kota Denpasar yang disebabkan oleh belum optimalnya pelayanan angkutan umum perkotaan.
2. Semakin tingginya Penggunaan Kendaraan Pribadi dijalan menyebabkan tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan dibandingkan dengan jumlah ruas jalan yang ada sehingga kemacetan semakin meluas
3. Rendahnya tingkat keamanan, keselamatan dan ketertiban lalu lintas disebabkan oleh rendahnya kesadaran disiplin berlalu lintas oleh masyarakat.

4. Masih Terpusatnya kegiatan/aktivitas/mobilitas di pusat kota Denpasar menyebabkan pergerakan lalu lintas terkonsentrasi di beberapa wilayah

Selain isu transportasi tersebut diatas, isu penurunan perekonomian di Kota Denpasar akibat pandemi penyebaran virus *covid-19* yang terjadi sejak tahun 2020 membuat laju perekonomian turun drastis menjadi -9,42% sehingga secara langsung telah berdampak ke tidak tercapainya target pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Kota Denpasar. Kondisi itu akan mempersulit program peningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana di sektor keselamatan jalan di kota Denpasar yang bersumber dari APBD kota Denpasar.

3.1.2 Identifikasi Permasalahan yang Timbul

Permasalahan yang mendasar di Kota Denpasar adalah menurunya kualitas pelayanan angkutan umum perkotaan, sehingga masyarakat memilih menggunakan sepeda motor atau kendaraan pribadi agar kebih fleksibel dalam melakukan perjalanan. Jika dilihat dari data jumlah izin trayek yang dikeluarkan di Kota Denpasar, jumlah izin trayek setiap tahun mengalami penurunan dan tidak memenuhi target yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Denpasar. Jumlah izin trayek yang dikeluarkan menurun akibat menurunnya jumlah angkutan kota yang beroperasi karena banyak sopir angkutan kota/umum yang beralih profesi akibat menurunnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum di Kota Denpasar

Kalau melihat sejarah dari perkembangan transportasi di Kota Denpasar, sejak terjadinya krisis ekonomi yang tahun 1997 perekonomian di kota Denpasar menurun drastis, pilihan kendaraan pribadi sebagai moda transportasi yang dominan karena dirasa lebih efisien, baik untuk daerah urban maupun sub urban. Populasi pergerakan mobil pribadi yang begitu besar di daerah perkotaan ditambah dengan pola angkutan umum yang masih tradisional, menimbulkan biaya sosial yang sangat besar akibat waktu tempuh yang terbuang percuma, pemborosan bahan bakar minyak, depresi kendaraan yang terlalu cepat, kecelakaan lalu lintas, hilangnya *opportunity cost*, timbulnya stress, meningkatnya polusi udara, dan kebisingan. Hal ini sejalan dengan pembangunan ekonomi dan makin bertumbuhnya jumlah masyarakat golongan menengah dan menengah atas didaerah perkotaan, yang terjadi jauh sebelum krisis.

Kenyamanan, keamanan, *privacy*, fleksibilitas pergerakan dan *prestise* merupakan faktor-faktor utama yang menyebabkan kendaraan pribadi tetap memiliki keunggulan sebagai moda transportasi, khususnya di daerah urban. Sementara itu "Sistem Angkutan Urrium Massal" (SAUM) yang modern sebagai bagian integral dari ketahanan daya dukung kota (*city survivaf*) pada saaat itu masih dalam tahap rancangan dan perencanaan serta beium berada didalam jalur utama (*mainstream*) kebijakan dan keputusan pemerintah dalam rangka menciptakan sistem transportasi kota yang berimbang, efislen dan efektif serta memenuhi aspek transportasi yang berkelanjutan.

Kondisi tersebut menyebabkan lalu lintas di Kota Denpasar didominasi oleh kendaraan pribadi mencapai lebih dari 90%. Jika dilihat dari data jumlah sepeda motor, Gambar 3,1 jumlah sepeda motor di Kota Denpasar selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan hingga rasio kepemilikan kendaraan dengan jumlah penduduk sudah mendekati 1:1 yang artinya setiap rumah memiliki kendaraan pribadi sama dengan jumlah anggota keluarganya. Karakter wilayah yang perjalannnya relatif jarak pendek membuat masyarakat lebih nyaman menggunakan kendaraan pribadi selain itu Tingginya penggunaan kendaraan pribadi, yang diakibatkan oleh belum terintegrasinya antar sektor transportasi umum di Kota Denpasar.

Dari uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan transportasi yang terjadi di Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya kualitas pelayanan angkutan umum perkotaan
2. Kemacetan yang terjadi semakin meluas
3. Angka kecelakaan setiap tahunnya meningkat
4. Angka pelanggaran lalu lintas masih tinggi
5. Pelanggaran tata ruang masih kerap terjadi
6. Kesadaran msayarakat berlalu lintas yang tertib masih rendah

Semua Permasalahan tersebut diatas, memerlukan suatu kebijakan yang dapat mendukung perkembangan angkutan umum perkotaan. Akan tetapi, dampak sosial dan budaya dari kebijakan tersebut perlu diperhitungkan. Sosialisasi kepada masyarakat perlu dilakukan secara terus-menerus. Aspirasi dari setiap unsur masyarakat perlu didengar dan digali serta dampak negatif dari setiap rencana kebijakan harus diminimalkan, bahkan kalau dapat tanpa menimbulkan dampak negatif. Kebijakan angkutan umum harus mampu mengakomodir aspirasi dari

operator-operator angkutan umum yang ada dibawah organisasi angkutan darat (organda).

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah akan berpengaruh pada arah pembangunan daerah Kota Denpasar selama lima tahun mendatang. Arah pembangunan lima tahun ini termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2021–2025. Sebagai rencana jangka menengah, RPJMD Tahun 2021–2025 merupakan bagian dari tahapan keempat yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005–2025. Oleh karena itu, penyusunan dokumen RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021–2025 yang merupakan penjabaran dari visi misi kepala daerah terpilih harus mengacu pada dokumen RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005–2025 dan turunan dari RPJMD adalah renstra perangkat daerah yang harus disusun setelah RPJMD ditetapkan.

Adapun Visi Wali Kota dan Wakil walikota Kota Denpasar periode 2021-2026 yaitu: **"Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju"**

Untuk Dinas Perhubungan akan menjalankan program berkaitan dengan sasaran mencapai misi Kota Denpasar pada misi 2, 3 dan 4. Adapun misi tersebut adalah:

1. Misi II Wali Kota yaitu: **"Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana",**

   Pada misi ini Dinas Perhubungan akan melaksanakan program untuk menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas dan antisipasi kesiapsiagaan bencana melalui penerapan manajemen lalu lintas yang efektif dan efisien.
2. Misi III **"Kejujuran dan spirit Swaka Dharma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola kepemerintahan yang baik *(Good Governance)*.** Pada misi ini keterkaitan dengan program Dinas Perhubungan yakni melalui pelayanan publik di sektor pengujian kendaraan bermotor, di palayanan angkutan orang dan barang.
3. Serta menunjang Misi IV **"Unggul kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita**

Karana". Dalam kebijakan pembangunan transportasi di Kota Denpasar, Dinas Perhubungan membangun sarana dan prasarana transportasi dengan pemanfaatan teknologi dalam pengembangan infrastruktur di Kota Denpasar, sasarannya dengan teknologi maupun mengintegrasikan transportasi antar dan intermodal yang ada di Kota Denpasar.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Sebagai suatu dokumen tertulis yang berfungsi sebagai *Blue Print* Organisasi dinas, akan terlihat di dalam Renstra yang terkait dengan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga organisasi akan memiliki kemampuan dalam akselarasi dan mendorong pembangunan sesuai bidang dan kewenangannya. Secara administratif Renstra dapat dijadikan sebagai pedoman seluruh anggota organisasi dalam aktivitas merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Dengan kata lain Renstra dapat menjadi parameter kinerja selama 5 (lima) tahun.

Renstra yang disusun tahun 2021-2026 lebih menitikberatkan pada pengembangan transportasi yang ramah lingkungan dan yang mampu memberikan kemudahan masyrakat dalam melakukan pergerakan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Denpasar baru mengakomodir sebagian kecil pelaksanaan rencana pemanfaatan ruang pada 20 (dua puluh) tahun ke depan, sehingga masih terjadi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukan lahannya. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar telah ditetapkan dengan Perda Kota Denpasar Nomor: 7 Tahun 2011 yang saat ini tengah direvisi.

Dalam persiapan merumuskan kebijakan teknis perencanaan tata ruang, Dinas perhubungan Kota Denpasar berperan melakukan kegiatan koordinasi dengan instansi teknis pendukung dan pemanfaat Rencana Tata Ruang Wilayah

terkait dengan penyusunan program dibidang Insraftruktur Wilayah terlebih lagi secara makro beban keuangan daerah pasca pendemi *covid-19* menuntut seluruh perangkat daerah agar lebih inovatif dan meningkatkan fungsi koordinais ke tingkat pusat agar bantuan pembangunan fisik khususnya terkait sarana prasarana perhubungan dapat terlaksana di Kota Denpasar dalam 5 tahun kedepannya.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan sehubungan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seringkali menimbulkan dampak dan permasalahan lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan selama beberapa dekade ini cukup menjadi perhatian di beberapa negara termasuk di Indonesia. Seiring berjalannya waktu dan pesatnya pembangunan mengakibatkan terjadinya degradasi lingkungan. Efek dari degradasi lingkungan ini berpengaruh terhadap keberlanjutan sumber daya alam serta lingkungan hidup di masa mendatang. Semakin meluas dan semakin kompleksnya pembangunan berkelanjutan cenderung terjadi permasalahan dalam lingkungan hidup, ditengarai diantaranya karena bermula dari perencanaan pembangunan yang tidak seimbang antara pertumbuhan ekonomi ketimbang ekologi, sehingga sebagai akumulasinya dalam dekade terakhir ini terjadi krisis lingkungan berupa bencana lingkungan, peningkatan laju kerusakan sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan. Sebagai akibatnya, biaya (*cost*) dampak lingkungan hidup yang harus ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah jauh lebih besar ketimbang manfaat (*benefit*) ekonomi yang diperoleh. Berbagai permasalahan sosial ekonomi juga menyertai permasalahan lingkungan hidup seperti disparitas ekonomi antar kelompok masyarakat dan antar wilayah. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif dan efisien, perlu adanya instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang salah satunya adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (selanjutnya disebut dengan KLHS). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 15 ayat 1 mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Selanjutnya ayat 2 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas ke dalam penyusunan atau evaluasi: a). Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; b). Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah pasal 2 menyebutkan: "Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melaksanakan KLHS dalam penyusunan RPJPD, RPJMD Semesta Berencana, dan Renstra SKPD yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup"

3.5 Analisis SWOT

Perkembangan wilayah Kota Denpasar tidak terlepas dari tarikan dan dorongan internal maupun eksternal yang berlangsung di dalamnya. Kekuatan tarikan dan dorongan internal maupun eksternal ini merupakan rangkaian dari lingkungan strategis yang mempengaruhi Kota Denpasar secara umum dan sektor transportasi pada khususnya. Keberadaan rencana dan paradigma rencana pengembangan kegiatan atau program, yang berisikan diantaranya isu-isu strategis serta peranan kemampuan daya dukung lahan serta permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa mendatang menjadi sangat penting untuk dicermati. Rencana aksi strategis tersebut akan mendorong pertumbuhan kawasan-kawasan di wilayah Kota Denpasar.

Analisis lingkungan strategis dilakukan berdasarkan analisis SWOT yang didasarkan atas nilai perbandingan External Factor Analysis Strategy (EFAS) dan Internal Factor Analysis Strategy (IFAS) yang ada pada wilayah Kota Denpasar. Langkah ini diambil agar diketahui kondisi lingkungan stratejik yang mendukung dari kondisi terkait dengan transportasi Kota Denpasar. Tahapan awal dalam analisis lingkungan strategis ini dengan merumuskan kebijakan tentang pengembangan transportasi wilayah Kota Denpasar dengan melihat faktor-faktor yang berpengaruh dalam lingkungan internal maupun eksternal seperti diperlihatkan pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1

Analisis SWOT Kebijakan Transportasi di Kota Denpasar

INTERNAL / EKSTERNAL	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	1. Kelembagaan sektor perhubungan memadai 2. SDM mencukupi 3. Lahan relatif datar 4. Infrasturktur telah berkembang 5. Komitmen pimpinan yg kuat	1. Sulitnya lahan untuk pengembanganjalan 2. Kapasitas jalan terbatas 3. Parkir di badan jalan mengurangikapasitas jalan 4. Lemahnya penegakan aturan 5. Terbatasnya pendanaan Dampak pandemi covid 19 6 Kurangnya koordinasi antar instansi 7 Fasilitas belum memihak pada disable 8 Kurang sinerginya tata guna lahan dan transportasi 9 Kian terpuruknya angkutan umum 10 Belum terintegrasinya sistemmultimoda 11 Belum memadainya fasilitas pedestrian, bersepeda dan dokar 12 Tercampurnya kendaraan barang dan orang pada ruang jalan yg terbatas 13 Kurang luasnya lahan TerminalBarang 14 Lokasi gudang di tengah kota 15 Konflik arus pergerakan menerus dan lokal pada jalan arteri dan jalanlingkar
PELUANG (O)	**STRATEGI S-O**	**STRATEGI W-O**
1. Masih banyak peluang investasi yg masuk ke KotaDenpasar 2. Sebagai simpul transportasi regional, nasional dan internasional 3. Penataan transportasi makro di kawasan Sarbagita 4. Pengembangan Intelligent Transport System (ITS) 5. Pengembangan angkutanmassal berbasis TOD 6. Pengembangan transportasi yg ramahlingkungan (un-motorized) 7. Pengembangan angkutanwisata	1. Menjalin kerjasama dan koordinasi pembangunan transportasi di kawasan Sarbagita 2. Menyiapakan penerapan ITS 3. Menyiapkan pengembangan angkutanmassal berbasis TOD 4. Memberikan prioritas pengembanganangkutan umum 5. Mengembangkan transportasi ramahlingkungan	1. Memberikan prioritas pada pengembangan angkutan umum 2. Melarang parkir di badan jalan dan menyediakan kantong parkir 3. Meningkatkan penegakan aturan 4. Sosialisasi tertib lalu lintas 5. Meningkatkan koordinasi antarinstansi 6. Mengembangkan Transit Oriented Development (TOD) 7. Revitalisasi sistem angkutan umum 8. Menyediakan fasilitas pejalan kaki,bersepeda dan dokar yg memadai 9. Memperluas terminal barang 10. Menata lokasi gudang 11. Menyediakan jaringan lintas angkutan barang 12. Mengurangi konflik pergerakanmenerus dan lokal
ANCAMAN (T)	**STRATEGI S-T**	**STRATEGI W-T**
1. Kepadatan penduduk dan aktivitas terus meningkat 2. Arus urbanisasi yg tinggi 3. Kepemilikan kendaraanbermotor terus meningkat 4. Kemacetan pada ruas dansimpang meluas 5. Konflik kegiatan adat dankelancaran lalu lintas	1. Membatasi perkembangan penduduk danaktivitas sesuai dg carrying capacity 2. Mendukung pemerataan pembangunan kekab lain 3. Membatasi parkir di badan jalan dan menyediakan kantong parkir 4. Mengatur kegiatan adat supaya tidak mengganggu kelancaran lalu lintas 5. Membatasi penggunaan kendaraan pribadi	1. Mengembangkan transportasi publikyg handal 2. Mengembangkan simpang tak sebidang 3. Mengembangkan sistem sirkulasi lalulintas satu arah 4. Membatasi parkir di badan jalan 5. Membatasi penggunaan kendaraanpribadi
6. Angkutan umum kianterpuruk 7. Polusi udara dan suara kianmeningkat 8. Kecelakaan kian meningkat 9. Kualitas kesehatan menurun	6. Mengembangkan transportasi ramah lingkungan (angkutan umum, kend tak bermotor, sepeda, berjalan kaki)	6. Mengembangkan ITS 7. Manajemen Demand Car Pooling, dll 8. Mengembangkan areal pedestrian 9. Pengembangan fasilitas untukdisable (tuna netra, lumpuh, dll)

Faktor internal mencerminkan keunggulan, kekuatan, ataupun potensi yang dimiliki serta kelemahan atau kendala yang terjadi dalam menyelenggarakan pelayanan transportasi, sedangkan faktor eksternal merupakan peluang yang dapat diraih atau

dimiliki serta ancaman atau rintangan yang sulit dihindarkan. Oleh sebab itu mensiasati ancaman, kendala, atau tantangan menjadi suatu peluang atau kekuatan membutuhkan strategi khusus dalam kebijakan transportasi Kota Denpasar. Dalam menyusun strategi yang akan digunakan untuk mengantisipasi terhadap pertumbuhan yang terjadi di Kota Denpasar, digunakan analisa SWOT yang maksudkan untuk melihat sejauh mana kekuatan (strengthness), hambatan (weakness), peluang (opportunities), serta tantangan (threats) yang memberi peranan dalam pertumbuhan kawasan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di atas.

3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis

Perkembangan transportasi Kota Denpasar tidak terlepas dari isue-isue strategis baik yang terkait langsung dengan sektor transportasi maupun yang mempengaruhi sektor transportasi tersebut. Isue-isue strategis tersebut dapat dipengaruhi baik dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal) yang tentunya akan mempengaruhi terhadap perubahan sistem transportasi yang ada. Isu-isu strategis yang dijabarkan di dalam pengembangan transportasi wilayah Kota Denpasar adalah sebagai berikut.

3.6.1 Perkembangan Tata Guna Lahan

Isu utama dalam prasarana transportasi di Kota Denpasar khususnya jaringan jalan yaitu lemahnya struktur jaringan jalan dimana Kota Denpasar tidak memiliki struktur ideal seperti grid ataukah ring-radial sehingga terjadi pencampuran dan penumpukan pergerakan menerus dan lokal di pusat Kota Denpasar. Jaringan jalan lingkar Kota Denpasar seperti Jalan Bypass Gatot Subroto dan Bypass Ngurah Rai merupakan perlintasan pergerakan lalu lintas lokal, regional dan nasional. Sehingga terjadi konflik pergerakan yang seringkali justru menyebabkan kemacetan lalu lintas. Lebar jalan di Kota Denpasar terbatas dan hampir tidak memungkinkan lagi dilakukan pengembangan jalan. Lebar jalan yang sudah terbatas dan dikurangi lagi kapasitasnya oleh keberadaan parkir di badan jalan. Perkembangan volume lalu lintas yang tinggi dari tahun ke tahun tidak mampu diikuti dengan penambahan jaringan jalan. Pada sebagian persimpangan dan ruas jalan kapasitasnya sudah mulai terlampui. Tundaan yang tinggi dan kemacetan lalu lintas mulai menjadi pemandangan sehari-hari di Kota Denpasar terutama pada saat jam puncak. Oleh sebab itu kinerja simpang

dan ruas jalan di Kota Denpasar sangat rentan dan dipengaruhi oleh perkembangan aktivitas dan permukiman terutama di Kota Denpasar dan Badung Selatan. Arus urbanisasi yang terus meningkat setiap tahun akibat pesatnya perkembangan tata guna lahan terutama di Denpasar dan Badung Selatan akan kian membebani jaringan jalan di Kota Denpasar.

3.6.2 Pengembangan Pusat-pusat Perbelanjaan dan Perdagangan

Pusat perbelanjaan berskala besar seperti swalayan dan mall telah berkembang pesat di Kota Denpasar, seperti Tiara Dewata, Ramayana, Matahari, Level 21, dan sepanjang Mahendradata. Bangkitan yang ditimbulkan oleh pusat-pusat perbelanjaan tersebut cukup tinggi. Terbatasnya ruang parker telah menyebabkan penggunaan sebagian badan jalan untuk parkir kendaraan. Hal ini selain mengurangi kapasitas jalan juga mengakibatkan tundaan yang tinggi hingga kemacetan lalu lintas. Pengembangan pusat-pusat perbelanjaan skala besar seperti ini ke depannya harus memiliki kajian analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN) sebelum diterbitkannya IMB. Selain pusat-pusat perbelanjaan berskala besar, di Kota Denpasar juga kian menjamur aktivitas pedagang kaki lima dengan konsep *modern* yang menjual makanan nasi jingo dan kopi disertai dengan *live* musik. Kondisi ini merupakan dampak dari Kota Denpasar sebagai pusat kegiatan dan pusat pendidikan yang aktivitas di malam hari semakin tinggi. Namun demikian yang harus menjadi perhatian sebagian besar usaha tersebut merupakan peralihan fungsi bangunan eksisting dan tidak menyediakan tempat parkir yang memadai sehingga kendaraan parkir di badan jalan. Maka dari itu, ke depannya sangat memerlukan perhatian khusus untuk meminimalisir dampak yang terjadi. Demikian pula pasar-pasaar tradisional banyak yang tidak memiliki fasilitas parkir dan ruang sirkulasi arus lalu lintas memadai sehingga menyebabkan kemacetan pada ruas jalan di sekitarnya. Pedagang berjualan hingga meluber ke pinggir jalan dan di atas trotoar secara tidak terkendali, sehingga menyebabkan kesemrawutan lalu lintas. Pedagang musiman baik berkendaraan maupun tidak, akhir-akhir ini dengan alasan dampak pandemi *covid-19* mulai banyak berjualan di pinggir jalan sehingga menyebabkan kesan kumuh dan mengganggu arus lalu lintas. Bila hal ini jika dibiarkan tanpa penertiban, maka para pedagang akan kian menjamur dan kelancaran lalu lintas terganggu.

3.6.3 Pembangunan Hotel dan Condotel

Sebagai daerah pariwisata, kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara terus meningkat setiap tahunnya. Pembangunan hotel dan condotel juga mengalami peningkatan. Hotel dan contodel merupakan salah satu sumber bangkitan perjalanan di Kota Denpasar. Sebagian hotel dan condotel tersebut jika tidak menyediakan tempat parkir yang memadai akan memanfaatkan badan jalan untuk parkir. Kendaraan pariwisata dan taksi yang menunggu wisatawan cenderung antri membentuk terminal bayangan disekitar lokasi hotel dan condotel tersebut. Oleh karena itu, persyaratan IMB perlu diperketat dan diprasyaratkan untuk dilakukan kajian Andalalin agar pihak pengembang memperhatikan kecukupan fasilitas parkir yang disediakan dan maneuver kendaraan masuk/keluar tidak sampai mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

Pembangunan hotel dan Condotel di Badung Selatan juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pembangunan hotel beserta aktivitas penunjangnya diikuti oleh kian meningkatnya arus urbanisasi. Pergerakan dari/ke Badung Selatan melintasi jaringan jalan di Kota Denpasar seperti halnya sepanjang wilayah Denpasar Barat desa Pemecutan kelod sampai padang sambian. Sehingga apabila perkembangan aktivitas kepariwisataan terus berkembang di Badung Selatan, maka akan berkontribusi terhadap kian parahnya kemacetan lalu lintas yang terjadi di Kota Denpasar.

3.6.4 Perkembangan Permukiman

Dengan kian meningkatnya aktivitas perekonomian di Kota Denpasar dan juga Badung Selatan, maka perkembangan permukiman juga kian meningkat untuk mengakomodasi perkembangan jumlah para pekerja yang tinggal di Kota Denpasar. Para pengembang maupun masyarakat seringkali melanggar jalur hijau akibat kian terbatasnya lahan di Kota Denpasar. Harga tanah kian meningkat dan sebagai konsekuensinya perkembangan permukiman terjadi dengan pesat ke arah luar Kota Denpasar yaitu kearah Badung, Gianyar, Tabanan bahkan hingga ke Klungkung. Kondisi ini telah menyebabkan kian meningkatnya arus pergerakan eskternal yang membebani jaringan jalan di Kota Denpasar.

3.6.5 Perkembangan Sekolah

Sebagai Kota Inti dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Sarbagita, sekolah-sekolah favorit terpusat di Kota Denpasar. Distribusi lokasi sekolah favorit ini tidak menyebar merata secara spasial. Tidak juga ada upaya rayonisasi sekolah. Sebagai akibatnya pergerakan dari/ke sekolah di Kota Denpasar turut berkontribusi terhadap kemacetan yang terjadi khususnya pada saat jam puncak pagi dan jam puncak siang. Lokasi sekolah yang berada pada jalan utama di Kota Denpasar menimbulkan konflik pergerakan dengan arus lalu lintas menerus. Hampir setiap hari bisa ditemui adanya kemacetan lalu lintas pada jam masuk/keluar siswa sekolah di Kota Denpasar. Banyak sekolah yang tidak dapat menyediakan fasilitas parkir dan maneuver kendaraan antar/jemput yang memadai sehingga membebani ruas jalan disekitarnya. Siswa TK, SD dan SMP sebagian besar moda transportasinya ke sekolah dengan diantar/jemput dengan kendaraan pribadi. Sebagian siswa SMP dan siswa SMU sangat tergantung pada penggunaan kendaraan pribadi ke sekolah. Beban lalu lintas akibat perjalanan dari/ke sekolah cukup tinggi dan dampaknya cukup luas mengingat pola pergerakan siswa tersebar ke seluruh pelosok kota bahkan ada yang berasal dari luar Kota Denpasar. Dari hasil studi kajian bus sekolah tahun 2015 didapatkan jumlah pelajar yang berdomilisi di Kota Denpasar lebih dari 125.000 jiwa, persentase siswa sekolah yang menggunakan angkutan umum sangat kecil kurang dari 1 %. Hal ini antara lain akibat rendahnya koneksitas trayek dan kualitas pelayanan angkutan umum serta tingginya biaya perjalanan dengan angkutan umum.

3.6.6 Perkembangan Prasarana Transportasi

Perkembangan volume lalu lintas (aspek demand) jauh lebih pesat daripada kemampuan pemerintah untuk mengembangkan prasarana transportasi (aspek supply). Perkembangan panjang jalan di Kota Denpasar hanya sekitar 0,48% per tahun. Berbagai rencana pengembangan simpul transportasi seperti Bandar Udara Ngurah Rai, Pelabuhan Benoa, Pelabuhan Sanur, dan Terminal Modern Ubung, yang menimbulkan tambahan bangkitan perjalanan, akan mempengaruhi kinerja jaringan jalan di Kota Denpasar, wajib dijadikan antisipasi di dalam pembangunan transportasi 5 (lima) tahun ke depan. Adapun program tersebut adalah sebagai berikut:

a. Rencana Pelabuhan Sanur dan Pelabuhan Benoa

Pelabuhan Sanur yang saat ini sedang dibangun oleh Kementrian Perhubungan akan dirancang melayani pergerakan orang maupun barang antar kabupaten/kota di Provinsi Bali terutama penyebrangan lintas Sanur – Nusa Penida. Pelabuhan Sanur dikembangkan secara terbatas sebagai Pelabuhan Pengumpan Lokal sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan arahan Tatrawil Provinsi Bali (2012) yang kewenangam pengelolaannya di Pemerintah Kota Denpasar. Pelabuhan Sanur akan mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2022 dengan kapasitas daya tamping kapal sebanyak 75 unit. Mitigasi yang perlu dilakukan salah satunya adalah menyiapkan intergrasi moda trasportasi ke pelabuhan dan diperlukan akses keluar masuk ke Pelabuhan Sanur dari jalur utama By Pass Ngurah Rai.

Selain Pelabuhan Sanur, pengembangan Pelabuhan Benoa sebagai pelabuhan regional di Provinsi Bali perlu mendapatkan perhatian pemerintah Kota Denpasar. Pelabuhan Benoa merupakan Pelabuhan Utama yang dikembangkan terutama untuk pergerakan orang baik lintas nasional maupun internasional (wisatawan melalui kapal Cruise). Luas pelabuhan yang disetujui sesuai arahan RTRW Kota Denpasar yaitu seluas 143 Ha. Kegiatan bongkar muat barang dilakukan secara terbatas dan diarahkan ke Pelabuhan Celukan Bawang untuk mengurangi beban lalu lintas angkutan barang di Kota Denpasar.

b. Pengembangan Terminal Modern Ubung di Kota Denpasar

Kota Denpasar merupakan simpul perlintasan dari jalur-jalur pergerakan regional, khususnya di Bali Selatan. Dalam perkembangannya, seiring dengan meningkatnya intensitas kegiatan perangkutan umum regional, ditambah dengan perangkutan lokal (antar kabupaten dan kecamatan) dan adanya rencana pengembangan Terminal Ubung sebagai Terminal Modern dan TOD akibatnya sejumlah persoalan muncul berkaitan dengan kelancaran turun-naik penumpang, perparkiran bus dan kendaraan lain, serta kenyamanan. Diperlukan penegasan fungsi terminal dan penataan sistem

operasional angkutan umum untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

c. Pengembangan Simpul Angkutan Barang

Keberadaan simpul angkutan barang di Jalan Gunung Galunggung, Padasambian Kaja, Denpasar memiliki luas 2 Ha. Luas bangunan lantai I, II dan III masing-masing 1,050 m2. Luas areal yang diaspal 8.268 m2. Luas gudang seluruhnya 1.398,82 m2 (terdiri dari 16 gudang). Luas jembatan timbang 156 m2 (kapasitas 60 ton). Bengkel dan perawatan seluas 60 m2 dan ruang tunggu awak kendaraan seluas 80 m2. Kantin 50 m2, Genset 28 m2, Pos jaga 1 (10 m2), pos jaga 2 (2,2 m2), pos jaga 3 (7 m2). Tempat sudi/padmasana 65 m2. Akses jalan masuk terminal (panjang 1 km, lebar 14 m). Daya tampung kendaraan besar 50 unit.

Dalam kenyataannya simul angkutan Barang tersebut tidak dapat menampung keseluruhan kendaraan barang yang ada. Gudang-gudang yang ada seperti disepanjang Jl. Mahendradata tidak menyediakan ruang parkir yang memadai. Sehingga disepanjang jalan tersebut dipenuhi oleh truk-truk besar yang parkir menunggu untuk bongkar muat barang. Rata-rata akumulasi kendaraan truk yang parkir mencapai 98 unit per jam. Untuk itu diperlukan perluasan areal terminal barang. Disamping itu, dengan rencana dibatasinya waktu bagi kendaraan barang untuk memasuki jaringan jalan di Kota Denpasar, maka diperlukan tempat mangkal bagi kendaraan barang tersebut sebelum dapat melanjutkan perjalanannya.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1 Perumusan Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melakukan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun tujuan yang menjadu dasar pencapaian visi dan misi adalah sebagai berikut:

"Meningkatkan keselamatan, kelancaran, kenyamanan, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan serta angkutan laut."

4.1.2 Perumusan Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun sasaran yang menjadi dasar tujuan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya sistem transportasi perkotaan yang berkelanjutan.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di sektor perhubungan.
3. Meningkatnya sarana transportasi yang berkeselamatan.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Denpasar

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Taget Kinerja Sasaran Pada Tahun					Formulasi
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan keselamatan, kelancaran, kenyamanan, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan serta angkutan laut	Terwujudnya sistem transportasi perkotaan yang berkelanjutan	Peningkatan Load Faktor Angkutan	33%	33%	34%	35%	35%	$\frac{Jumlah\ Penumpang}{Jumlah\ Tempat\ Duduk \times Hari\ Operasi} \times 100\%$
		Meningkatnya prasarana dan fasilitas transportasi yang berkeselamatan	Pemenuhan Prasarana den Fasilitas LLAJ dan Angkutan Laut	60%	62%	65%	70%	80%	$\frac{Jumlah\ Prasarana\ yang\ Berfungsi\ Baik}{Kebutuhan\ Prasarana} \times 100\%$
		Meningkatnya sarana transportasi yang berkeselamatan	Persentase sarana angkutan yang berkeselamatan	55%	57%	60%	70%	75%	$\frac{Jumlah\ Kendaraan\ yang\ Uji\ Baik}{Jumlah\ Kendaraan\ Wajib\ Uji \times 2} \times 100\%$

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Perumusan Strategi

Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Denpasar, diperlukan suatu strategi. Strategi pada hakekatnya menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konsepsual, analitis, rasional, realistis dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memeperlancar atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksudkan untuk mencapai hasil yang konsisten dengan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan

Rumusan strategi merupakan pernyataan – pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana dikemukan tersebut di atas, diperlukan strategi dan kebijakan yang merupakan arah politik (*political will*) dari Pemerintah Kota Denpasar bidang perhubungan, adapun strategi yang dilakukan yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum massal perkotaan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di jalan
2. Mengoptimalkan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di wilayah kota Denpasar yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja palayanan jaringan jalan dan persimpangan
3. Meningkatkan pelayanan publik dalam pengembangan kapasitas sarana dan prasarana transportasi darat maupun laut di wilayah kota Denpasar

Dari startegi diatas akan bermuara kepada sistem transportasi perkotaan yang berkelanjutan yang memenuhi aspek ekonomi, lingkungan dan kesetaraan pelayanan untuk semua lapisan masyrakat.

5.2 Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan Tujuan yang diinginkan tersebut di atas maka Dinas Perhubungan Kota Denpasar telah menetapkan Kebijakan yang mengacu dan

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Denpasar dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional 2021 – 2026 sebagai berikut:

1. Mewujudkan sistem transportasi yang berkelanjutan melalui peningkatan penggunaan angkutan umum perkotaan dan angkutan laut untuk menunjang aksesibilitas peregrakan masyarakat di wilayah kota Denpasar
2. Meningkatkan kinerja pelayanan ruas jalan dan persimpangan dengan indicator rasio volume disbanding kapasitas
3. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana transportasi yang berkeselamatan

Pengertian dari *Transportasi berkelanjutan* adalah sebuah konsep yang dikembangkan sebagai suatu antithesis terhadap kegagalan kebijakan, praktek dan kinerja sistem transportasi yang dikembangkan selama kurang lebih 50 tahun terakhir. Istilah transportasi berkelanjutan sendiri berkembang sejalan dengan munculnya terminologi pembangunan berkelanjutan pada tahun 1987 (*World Commission on Environment and Development, United Nation*). Secara khusus transportasi berkelanjutan diartikan sebagai "upaya untuk memenuhi kebutuhan mobilitas transportasi generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mobilitasnya". OECD (1994) juga mengeluarkan definisi yang sedikit berbeda yaitu: "Transportasi berkelanjutan merupakan suatu transportasi yang tidak menimbulkan dampak yang membahayakan kesehatan masyarakat atau ekosistem dan dapat memenuhi kebutuhan mobilitas yang ada secara konsisten dengan memperhatikan: (a) penggunaan sumberdaya terbarukan pada tingkat yang lebih rendah dari tingkat regenerasinya; dan (b) penggunaan sumber daya tidak terbarukan pada tingkat yang lebih rendah dari tingkat pengembangan sumberdaya alternatif yang terbarukan.

Dengan demikian, secara umum konsep *transportasi berkelanjutan* merupakan gerakan yang mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam upaya memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat. Dalam konteks perencanaan kota, konsep ini diterjemahkan sebagai upaya peningkatan fasilitas bagi omunitas bersepeda, pejalan kaki, fasilitas komunikasi, maupun penyediaan transportasi umum massal yang murah dan ramah lingkungan seperti kereta api

listrik maupun angkutan umum lainnya yang dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, khususnya di kawasan *Central Business District* (CBD). Disamping itu, konsep transportasi berkelanjutan juga mendorong upaya teknologi komunikasi dan informasi untuk mengurangi kebutuhan pergerakan orang dan barang melalui penerapan konsep *teleconference, tele-working, tele-shopping, tele-commuting*, maupun pengembangan kawasan terpadu di perkotaan yang dapat mengurangi kebutuhan mobilitas penduduk antar kawasan seperti *Transit Oriented Development (TOD)*. Konsep pengembangan Transportasi di Kota Denpasar mengarah pada transportasi yang manusiawi dan berkelanjutan.

Melihat fungsi transportasi sebagai kebutuhan turunan yang penting terkait pengembangan wilayah dengan kondisi makro regional, maka untuk mencapai tujuan umum peengembangan sistem transportasi di Kota Denpasar diarahkan antara lain sebagi berikut.:

1. Mengarahkan transportasi yang berkelanjutan dengan dapat memberikan kemudahan kinerja pelayanan bagi masyarakat terhadap kebutuhan akan mobilitas.
2. Pengembangan sektor transportasi yang realitis, efektif, efisien yang dapat mengikuti perkembangan wilayah sebagai perwujudan visi dan misi Provinsi Bali.
3. Mengembangkan transportasi yang memadai dan dapat terdistribusi pada setiap wilayah.
4. Mendukung angkutan umum massal yang handal.
5. Memberikan pelayanan transportasi yang memperhatikan unsur keselamatan, lingkunganan hemat bahan bakar.

Secara konseptual, arahan transportasi berkelanjutan (*sustainable transport*) adalah untuk melakukan pembangunan di bidang transportasi yang tidak hanya terfokus pada tujuan ekonomi tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial budaya secara berimbang seperti diperlihatkan pada gambar di bawah. Pembangunan di bidang transportasi diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi jangan sampai menyebabkan degradasi lingkungan dan sosial budaya.



Gambar 5.1 Tujuan *Transportasi Berkelanjutan*
Sumber: Litman, 2010

Berbagai tujuan perencanaan transportasi berkelanjutan di definisikan oleh Litman, (2010),

antara lain:

1) **Sistem Transportasi keragaman.**

   Masyarakat dapat memilih dari berbagai moda, lokasi dan pilihan harga, terutama sumber daya yang efisien, dan terjangkau.

2) **Integrasi Sistem.**

   Berbagai komponen dari sistem transportasi yang terintegrasi denganbaik, seperti pejalan kaki dan akses bersepeda untuk transit, dan transportasi terpadu dengan perencanaan penggunaan lahan.

3) **Keterjangkauan.**

   Layanan transportasi menyediakan pilihan moda yang terjangkau bagi masyarakat dari sisi ekonomi dan terjangkau dari sisi spasial dengan memberikan pelayanan hingga ke pelosok permukiman.

4) **Efisiensi sumber daya (energi dan lahan).**

   Efisien harga dan prioritas. Jalan, parkir, asuransi dan bahan bakar untuk mendorong harga efisien, dan fasilitas yang dikelola untuk

mendukung nilai kenyamanan dan keamanan yang lebih tinggi dan mode yang lebih efisien.

5) **Penggunaan lahan aksesibilitas (pertumbuhan *smart*).**
Kebutuhan pertumbuhan penggunaan lahan dalam perkembangannya bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dalam penggunaan lahan dan transportasi.

6) **Efisiensi operasional.**
Instansi transportasi, penyedia layanan dan fasilitas dikelola secara efisien untuk meminimalkan biaya dan memaksimalkan kualitas layanan.

7) **Komprehensif dan perencanaan yang inklusif.**
Perencanaan yang komprehensif, terpadu (pengambilan keputusan dikoordinasikan diantara sektor yang berbeda, yurisdiksi dan badan), dan inklusif (semua orang yang terkena dampak dapat berpartisipasi).

Selain fokus ke angkutan umum perkotaan dalam mewujudkan system transportasi yang berkelanjutan juga diperlukan kebijakan turunan lainya seperti Pengembangan Jalur Khusus Kendaraan Tak Bermotor. Penggunaan jalur lambat di wilayah Kota Denpasar perlu dikembangkan dan perlu suatu pengkajian yang lebih mendalam. Salah satu usaha untuk membiasakan penggunaan sepeda adalah dengan membudayakan *bike of work* maupun *car free day*. Dengan memperhatikan karakteristik kota dan kondisi topografinya maka dapat dimungkinkan gerakan penggunaan kendaraan tidak bermotor seperti sepeda untuk kegiatan keseharian seperti *bike to work* dapat digalakkan. Tetapi selain itu juga fasilitas seperti jalur lambat dan tempat parkir khusus sepeda perlu juga disediakan Untuk itu diperlukan fasilitas parkir sepeda di beberapa pusat kegiatan seperti pasar, pertokoan, perkantoran, dan sekolahan. Angkutan sepeda ini juga dapat dipergunakan sebagai sepeda wisata dengan menghubungkan pada lokasi-lokasi obyek wisata seperti yang sudah diterapkan di Sanur.

Selain sepeda, kendaraan tidak motor di Kota Denpasar adalah dokar. Dokar termasuk jenis moda transportasi tidak bermotor tapi memiliki karakter yang berbeda dengan sepeda, karena dokar menjadi sarana angkutan umum tidak bermotor. Dokar akan berperan sebagai sarana angkutan umum, sehingga diperlukan fasilitas tambahan berupa tempat untuk mangkal yang tidak mengganggu pengguna sepeda dan pejalan.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Visi: Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju

Misi 2: Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana

Misi 3: Kejujuran dan spirit Sewaka Dharma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

Misi 4: Unggul kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan keselamatan, kelancaran, kenyamanan, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan serta angkutan laut	Terwujudnya sistem transportasi perkotaan yang berkelanjutan	Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan orang dan barang	Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di jalan
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di sektor perhubungan	1. Meningkatnya prasarana dan fasilitas transportasi angkutan darat yang berkeselamatan 2. Meningkatnya prasarana dan fasilitas transportasi angkutan laut yang berkeselamatan	Peningkatan penyelenggaraan LLAJ dan angkutan laut yang efektif dan efisien
	Meningkatnya sarana transportasi yang berkeselamatan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengujian kendaraan bermotor	Meningkatkan keselamatan jalan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program kegiatan Dinas Perhubungan Kota Denpasar mengacu pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-37082020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemukhtarihan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dilaksanakan sebagai implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi yang telah disampaikan pada bab sebelumnya. Rencana Program tersebut adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).
3. Program Pengelolaan Pelayaran.

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja OPD sebagai bagian dari pencapain sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi dan atau kombinasi dari beberapa atau keseluruhan sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang dan jasa. Sub kegiatan merupakan impelemntasi dari NSPK pada masing-masing kewenangan.

Kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program pembangunan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
   Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program tersebut adalah:
   1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah:

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

   Sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah:

   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

   Sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah:

   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
   c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
   d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
   e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
   f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

   Sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah:

   a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

   Sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah:

   a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah:

   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
   b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
   c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).
   Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program tersebut adalah:
   1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.
      Sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah:
      a. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.
      b. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.
      c. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.
   2. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C.
      a. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung).
      b. Pengembangan Sasarana dan Prasarana Terminal.
   3. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
      Sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah:
      a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
      b. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
      c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
   4. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.
      Sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah:
      a. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.
      b. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota.
   5. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan.
      Sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah:

a. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota.
b. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.

6. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

   Sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah:

   a. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
   b. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

3. Program Pengelolaan Pelayaran.

   Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

   1. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

      Sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah:

      a. Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal.
      b. Pengoprasian dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal.

Tabel 6.1

Rencana, Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kota Denpasar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Formulasi	Perangkat Daerah Penanggungjawab Program
						Tahun 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		

Meningkatkan keselamatan, kelancaran, kenyamanan, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan serta angkutan laut		2 4	10 51			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**- Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kota**	**100%**	**100 %**	**Rp 49,976,220,614**	**100 %**	**Rp 54,973,842,675**	**100 %**	**Rp 60,471,226,943**	**100 %**	**Rp 66,518,349,637**	**100 %**	**Rp 73,170,184,601**	**100 %**	**Rp 73,170,184,601**	*(Jumlah Realisasi Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kota) / (Jumlah Target Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kota) × 100%*	Dinas Perhubungan Kota Denpasar

		1.15	**10**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**- Persentase Jumlah dokumen Perencanaan dan evaluasi**	**8 Dokumen**	100 %	**Rp 482,787,048**	100 %	**Rp 531,065,753**	100 %	**Rp 584,172,328**	100 %	**Rp 642,589,561**	100 %	**Rp 706,848,517**	100 %	**Rp 706,848,230**	*(Realisasi Dokumen Perencanaan dan Evaluasi) / (Jumlah Target Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang ada) × 100%*	

		2.15	**10.51**	**2.01.01**		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Persentase tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	**100%**	**100 %**	Rp 354,563,469	**100 %**	Rp 390,019,816	**100 %**	Rp 429,021,797	**100 %**	Rp 471,923,977	**100 %**	Rp 519,116,375	**100 %**	Rp 519,116,375	*(Realisasi Dokumen Perencanaan) / (Jumlah Target Dokumen Perencanaan yang ada) × 100%*	

		2.15	**10.51**	**2.01.01**	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Persentase tersusunnya laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	**100%**	**100%**	Rp 128,223,579	**100%**	Rp 141,045,937	**100%**	Rp 155,150,531	**100%**	Rp 170,665,584	**100%**	Rp 187,732,142	**100%**	Rp 187,732,142	*(Realisasi Dokumen Evaluasi) / (Jumlah Target Dokumen Evaluasi yang ada) × 100%*	

		2.10.51.02			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**- Persentase Terpenuhinya administrasi Keuangan Perangkat daerah**	**100%**	**100 %**	**Rp 18,848,964,381**	**100 %**	**Rp 20,733,860,819**	**100 %**	**Rp 22,807,246,901**	**100 %**	**Rp 25,087,971,591**	**100 %**	**Rp 27,596,768,750**	**100 %**	**Rp 27,596,768,750**	*(Realisasi Pembayaran dan Tunjangan ASN) / (Jumlah ASN) × 100%*	

		2	10	5	10	2	2.02.01.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100 %	Rp 18,848,964,381	100 %	Rp 20,733,860,819.10	100 %	Rp 22,807,246,901	100 %	Rp 25,087,971,591	100 %	Rp 27,596,768,750	100 %	Rp 27,596,768,750	*(Realisasi Pembayaran dan Tunjangan ASN) / (Jumlah ASN) × 100%*	
		2	**10**	**5**	**10**	**6**	**2.02.01.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**- Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**75%**	75%	**Rp 1,737,925,831**	77%	**Rp 1,911,718,414**	79%	**Rp 2,102,890,256**	81%	**Rp 2,313,179,281**	83%	**Rp 2,544,497,209**	**83%**	**Rp 2,544,497,209**	*(Realisasi Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah) / (Target Terlaksananya Administrasi Umum*	

																				Perangkat Daerah) × 100%	
		2 1 5	**1 0 5 1 0 6**	**2 . 0 1 0 6**	**0 1**	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Persentase pemenuhan komponen instalsi listrik /penerangan bangunan kantor yang tersedia	**60%**	**60%**	Rp 19,202,700	**65%**	Rp 21,122,970	**70%**	Rp 23,235,267	**75%**	Rp 25,558,794	**80%**	Rp 28,114,673	**80%**	Rp 28,114,673	*(Realisasi Komponen Instalasi Listrik) / (Jumlah Komponen Instalasi Listrik) × 100%*	
		2 1 5	**1 0 5 1 0 6**	**2 . 0 1 0 6**	**0 2**	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	- Persentase pemenuhan Belanj	**100%**	**100 %**	Rp 1,468,871,356	**100 %**	Rp 1,615,758,492	**100 %**	Rp 1,777,334,341	**100 %**	Rp 1,955,067,775	**100 %**	Rp 2,150,574,552	**100 %**	Rp 2,150,574,552	*(Realisasi Peralatan dan Perle*	

						Kantor	a Jasa Kantor															*ngkapan Kantor) / (Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor) × 100%*	
		2	**10**	**2**	**0**	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Persentase pemenuhan perlatanan rumah tangga	**50%**	**50%**	Rp 60,171,625	**55%**	Rp 66,188,788	**60%**	Rp 72,807,666	**65%**	Rp 80,088,433	**70%**	Rp 88,097,276	**70%**	Rp 88,097,276	*(Realisasi Peralatan Rumah Tangga) / (Jumlah Peralatan Rumah Tangga) × 100%*	

		2.15	10	51	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	- **Cetak 21 Jenis - Penggadaan 120000Lembar**	- **Cetak 21 Jenis - Penggadaan 120000 Lembar**	Rp 102,560,150	- **Cetak 21 Jenis - Penggadaan 120000 Lembar**	Rp 112,816,165	- **Cetak 21 Jenis - Penggadaan 120000 Lembar**	Rp 124,097,782	- **Cetak 21 Jenis - Penggadaan 120000 Lembar**	Rp 136,507,560	- **Cetak 21 Jenis - Penggadaan 120000 Lembar**	Rp 150,158,316	- **Cetak 21 Jenis - Penggadaan 120000 Lembar**	Rp 150,158,316	- *Jumlah barang cetak yang di cetak* - *Jumlah barang yang digandakan*	

		2.10.10.06					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang tersedia	**456 Eksemplar**	**456 Eksemplar**	Rp 54,450,000	**456 Eksemplar**	Rp 59,895,000	**456 Eksemplar**	Rp 65,884,500	**456 Eksemplar**	Rp 72,472,950	**456 Eksemplar**	Rp 79,720,245	**456 Eksemplar**	Rp 79,720,245	*Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan*	

		2 5	1 0 5 1	2 . 1 0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Terlaksanany a rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	**40 Kali**	**40 Kali**	Rp 32,670,000	**42 Kali**	Rp 35,937,000	**44 Kali**	Rp 39,530,700	**46 Kali**	Rp 43,483,770	**48 Kali**	Rp 47,832,147	**48 Kali**	Rp 47,832,147	*Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan*	
		2 5	1 0 5 1	2 . 1 0 7		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**- Persentase terpenuhinya Barang Milik Daera**	**90%**	40%	**Rp 91,845,442**	42%	**Rp 101,029,986**	44%	**Rp 111,132,985**	50%	**Rp 122,246,283**	55%	Rp 134,470,912	**55%**	Rp 134,470,912	*(Realisasi Terpenuhinya Barang Milik Daerah) /*	

							h Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																*(Jumlah Target Terpenuhinya Barang Milik Daerah) × 100%*	
		2	**10**	**1**	**2.07**	**06**	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Persentase terpenuhinya peralatan dan mesin lainnya	**40%**	**40%**	Rp 91,845,442	**42%**	Rp 101,029,986	**44%**	Rp 111,132,985	**50%**	Rp 122,246,283	**55%**	Rp 134,470,912	**55%**	Rp 134,470,912	*(Realisasi Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya) / (Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya) × 100%*	
		2	**10**	**1**	**2.0**		**Penyediaan Jasa Penunjan**	**- Persentase**	**90%**	100 %	**Rp 27,759,160,000**	100 %	Rp 30,535,076,000	100 %	Rp 33,588,583,600	100 %	**Rp 36,947,441,960**	100 %	**Rp 40,642,186,156**	100 %	**Rp 40,642,186,156**	*(Realisasi Peme*	

					8	**g Urusan Pemerintahan Daerah**	**terpenuhinya pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**															*nuhan Pelayanan Jasa) / (Jumlah Pemenuhan Pelayanan Jasa) × 100%*	
		2	1 0 5	1 0 8	2 . 0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Terbayarnya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	**12 Bulan**	**12 Bulan**	Rp 27,759,160,000	**12 Bulan**	Rp 30,535,076,000	**12 Bulan**	Rp 33,588,583,600	**12 Bulan**	Rp 36,947,441,960	**12 Bulan**	Rp 40,642,186,156	**12 Bulan**	Rp 40,642,186,156	*Jumlah Bulan Pembayaran Listrik, Telepon, LPJU, Band with, BHP, dan Air*	

		2.10.5.10.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**- Persentase Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik**	**85%**	85%	**Rp 1,055,537,912**	85%	**Rp 1,161,091,703**	90%	**Rp 1,277,200,874**	90%	**Rp 1,404,920,961**	90%	**Rp 1,545,413,057**	90%	**Rp 1,545,413,057**	*(Realisasi Penyediaan Jasa) / (Jumlah Penyediaan Jasa) × 100%*		
		2.10.5.10.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	- Jumlah kendaraan Dinas, operasional / lapangan yang terpelihara dan	50%	**87 unit**	Rp 503,117,912	**87 unit**	Rp 553,429,703.20	**87 unit**	Rp 608,772,674	**87 unit**	Rp 669,649,941	**87 unit**	Rp 736,614,935	**87 unit**	Rp 736,614,935	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas yang Dipelihara*		

						al atau Lapangan	laik jalan														
		2	10 5	10 1	2 . 10 9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	15%	**116 Unit**	Rp 131,802,000	**116 Unit**	Rp 144,982,200	**116 Unit**	Rp 159,480,420	**116 Unit**	Rp 175,428,462	**116 Unit**	Rp 192,971,308	**116 Unit**	Rp 192,971,308	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang Dipelihara*	
		2	10 5	10 1	2 . 10 9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah sarana dan prasarana dan gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara	35%	**2 Unit**	Rp 420,618,000	**3 Unit**	Rp 462,679,800	**3 Unit**	Rp 508,947,780	**3 Unit**	Rp 559,842,558	**3 Unit**	Rp 615,826,814	**3 Unit**	Rp 615,826,814	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara*	

	Terwujudnya sistem transportasi perkotaan yang berkelanjutan	2	10 52			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	- Persentase Kinerja Pelayanan Transportasi Perkotaan	35%	33%	**Rp 19,770,860,000**	33%	**Rp 21,747,940,000**	34%	**Rp 23,922,740,000**	35%	**Rp 26,315,010,000**	35%	**Rp 28,946,510,000**	35%	**Rp 28,946,510,000**	*(Jumlah Penumpang) / (Jumlah Tempat Duduk × Rate × Hari Operasi) × 100%*	Dinas Perhubungan Kota Denpasar

	Meningkatnya prasarana dan fasilitas transportasi yang berkeselamatan	**1.05.2.02**				**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**- Persentase terpenuhinya perlengkapan jalan kabupaten / Kota**	**100%**	96%	**Rp 8,052,577,875**	96%	**Rp 8,857,829,663**	97%	**Rp 9,743,618,629**	97%	**Rp 10,717,976,493**	97%	**Rp 11,789,773,141**	97%	**Rp 11,789,773,141**	*100% - ((Jumlah Lampu yang Diperbaiki / Jumlah Total Lampu) × 100%)*	

	Meningkatnya sarana transportasi yang berkeselamatan	2	**10** 5	**2** . **02**	**01**	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	- Jumlah Titik LPJU yang terpasang	55 titik	**55 titik**	Rp 769,406,524	**60 titik**	Rp 846,341,176	**65 titik**	Rp 930,981,294	**70 titik**	Rp 1,024,075,424	**75 titik**	Rp 1,126,481,966	**75 titik**	Rp 1,126,481,966	*Jumlah Total Titik Lampu yang Terpasang*	
							(*Dara jumlah LPJU sejumlah 18.178 titik)*																

		2025	**1052**	**2.02**	**02**	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	- Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas (Menguranggi Panjang Antrean)	**- 67%**	**-67%**	Rp 4,280,267,975	**-67%**	Rp 4,708,294,772.50	**-67%**	Rp 5,179,124,250	**-67%**	Rp 5,697,036,675	**-67%**	Rp 6,266,740,342.20	**-67%**	Rp 6,266,740,342	*(Realisasi Jumlah Jalan yang Berkinerja Baik) / (Seluruh Ruas Jalan) × 100%*	
							Jumlah Titik LPJU yang terpelihara	**- 627 titik**	**-627 titik**		**-627 titik**		**-627 titik**		**-627 titik**		**-627 titik**		**-627 titik**		*Jumlah Total Titik LPJU yang Terpeliharadengan Baik*	

							Pemenuhan kebutuhan kelancaran arus lalu lintas	**85 % terpenuhi**	**85 % terpenuhi**		**85 % terpenuhi**		**85 % terpenuhi**		**85 % terpenuhi**		**85 % terpenuhi**		**85 % terpenuhi**		*(Realisasi Jumlah Fasilitas yang Terpelihara) / (Kebutuhan Fasilitas yang Terpelihara) × 100%*	
		1.15	**10.2**	**2.02**	**04**	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	- Terpeliharanya APILL dan Terpeliharanya taman lalu lintas (Lapangan Luminta ng)	**85%**	**85%**	Rp 3,002,903,376	**85%**	Rp 3,303,193,713.60	**85%**	Rp 3,633,513,085	**85%**	Rp 3,996,864,393	**90%**	Rp 4,396,550,833	**90%**	Rp 4,396,550,833	*(Jumlah APILL yang Terpelihara) / (Jumlah Seluruh APILL yang Ada) × 100% [yang*	

																								termasuk kedalam APIL adalah traffic light, warning light, dan pelican crossing]	
		2	**1**	**0**	**2**	**3**	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**- Persentase Jumlah Peningkatan Penumpang**	**60%**	60%	**Rp 822,339,216**	63%	**Rp 904,573,138**	68%	**Rp 995,030,451**	73%	**Rp 1,094,533,496**	78%	**Rp 1,203,986,846**	**78%**	**Rp 1,203,986,846**	*(((Jumlah Penumpang tahun n - 1) - Tahun n)) / ((Jumlah Penumpang n-1) × 100%*	
		2	**1**	**2**	**2**	**3**	Pengembangan Sasrana	- Persentase	10%	25%	Rp 265,656,454	25%	Rp 292,222,099	25%	Rp 321,444,309	10%	Rp 353,588,740	5%	Rp 388,947,614	**90%**	Rp 388,947,614	*(Jumlah Fasili*	

						dan Prasarana Terminal	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal																*tas yang dikembangkan) / (Kebutuhan Sarpras Terminal) × 100%*	
		2	**15**	**2**	**##**	**4** Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	- Persentase tersedianya sarana dan prasarana terminal penumpang tipe C	50%	**55%**	Rp 556,682,762	**60%**	Rp 612,351,039	**65%**	Rp 673,586,142	**70%**	Rp 740,944,756	**75%**	Rp 815,039,232	**75%**	Rp 815,039,232	*(((Jumlah Fasilitas yang direhab tahun n-1) - Tahun n)) / ((Jumlah Fasilitas n-1)) × 100%*	
		2	**15**	**10**	**2**	**.05**	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**- Persentase terpenuhinya kendaraan**	**56%**	55%	**Rp 2,452,560,173**	57%	**Rp 2,697,816,190**	60%	**Rp 2,967,597,809**	70%	**Rp 3,264,357,590**	75%	**Rp 3,590,793,349**	**75%**	**Rp 3,590,793,349**	*(Jumlah Kendaraan yang Uji Baik) /*	

						wajib uji yang laik jalan																*(Jumlah Kendaraan Wajib Uji × 2) × 100%*	
		2.15	**10.2.05**		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	- Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor		**80%**	Rp 1,405,545,173	**85%**	Rp 1,546,099,690	**90%**	Rp 1,700,709,659	**95%**	Rp 1,870,780,625	**100 %**	Rp 2,057,858,687	**100 %**	Rp 2,057,858,687	*(Jumlah Realisasi Alat Uji yang Berfungsi Baik) / (Jumlah Alat Uji yang Ada) × 100%*	
		2.15	**10.2.05**	**04**	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	- Terpenuhinya Kebutuhan bukti uji pengujian berkal	**100%**	**100 %**	Rp 625,000,000	**100 %**	Rp 687,500,000	**100 %**	Rp 756,250,000	**100 %**	Rp 831,875,000	**100 %**	Rp 915,062,500	**100 %**	Rp 915,062,500	*(Jumlah Realisasi Kendaraan yang Lulus Uji Baik)*	

							a kendraan bermotor															/ *(Jumlah Blue yang tersedia)* × *100%*	
		2 1	**10 52**	**2 . 0 5**	**07**	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	- Kondisi sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang berfungsi dengan baik		**90%**	Rp 422,015,000	**90%**	Rp 464,216,500	**95%**	Rp 510,638,150	**95%**	Rp 561,701,965	**100 %**	Rp 617,872,162	**100 %**	Rp 617,872,162	*(Jumlah Realisasi Pemenuhan Operasional dan Pemeliharaan) / (Jumlah Pemenuhan Operasional dan Pemeliharaan yang Tersedia)* × *100%*	

		2	**10**	**2.06**		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**- Persentase terwujudnya manajemen rekayasa yang efektif dan efesien untuk jaringan jalan kabupaten / kota (tingkat kinerja pelayanan jalan)**	**50%**	50%	**Rp 2,939,253,160**	50%	**Rp 3,233,178,476**	54%	**Rp 3,556,496,324**	59%	**Rp 3,912,145,956**	64%	**Rp 4,303,360,552**	**64%**	**Rp 4,303,360,552**	*(Jumlah Realisasi Kegiatan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas) / (Jumlah Kegiatan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas) × 100%*	
		2	**10**	**2.06**	**01**	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksanany a Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu	**2 Lokasi**	**2 Lokasi**	Rp 71,925,500	**2 Lokasi**	Rp 79,118,050	**2 Lokasi**	Rp 87,029,855	**2 Lokasi**	Rp 95,732,841	**3 Lokasi**	Rp 105,306,125	**3 Lokasi**	Rp 105,306,125	*Jumlah Tempat × Setahun*	

							Lintas yang Baik																
		2 1 5	**1 0 2**	**2 . 2 0 6**	**0 4**	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kansel tibcarlantas	**50 Kali**	**50 Kali**	Rp 2,867,327,660	**72 Kali**	Rp 3,154,060,426	**72 Kali**	Rp 3,469,466,469	**72 Kali**	Rp 3,816,413,115	**72 Kali**	Rp 4,198,054,427	**72 Kali**	Rp 4,198,054,427	*6 × Bulan × Tahun*	

		2	10 5 2	2 . 0 8			**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	jumlah peserta AKUT tahun 2022	50 org	50 org	**Rp 1,693,590,098**	50 org	**Rp 1,862,949,108**	50 org	**Rp 2,049,244,019**	50 org	**Rp 2,254,168,420**	50 org	**Rp 2,479,585,262**	50 org	**Rp 2,479,585,262**	*Jumlah Pemilihan Abiyasa Teladan di Kota Denpasar*	
								- Persentase penurunan jumlah pelanggar Lalu lintas	5%	5%		1%		1%		1%		1%		1%		*(((Jumlah Pelanggaran tahun n-1)-Tahun n) / ((Jumlah Pelanggaran n-1)) × 100%*	
								Jumlah penertiban	24 kali	24 kali		0		0		0		0		0		*Jumlah Terla*	

				angkutan umum														*ksananya Penertiban Angkutan Umum*	

		1.15	**10.20.08**	**04**	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemilihan Abiyasa Teladan	**50 Orang**	**50 Orang**	Rp 1,657,261,598	**50 Orang**	Rp 1,822,987,758	**50 Orang**	Rp 2,005,286,534	**50 Orang**	Rp 2,205,815,187	**50 Orang**	Rp 2,426,396,706	**50 Orang**	Rp 2,426,396,706	*Jumlah Pemilihan Abiyasa Teladan di Kota Denpasar*	

		2.15	**10.2.08**		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Terlaksanany a Pemilihan Kelompok Masyarakat yang Berkeselamatan Lalu Lintas	**30 Orang**	**30 Orang**	Rp 36,328,500	**30 Orang**	Rp 39,961,350	**30 Orang**	Rp 43,957,485	**30 Orang**	Rp 48,353,234	**30 Orang**	Rp 53,188,557	**30 Orang**	Rp 53,188,557	*Jumlah Pemilihan Kelompok Masyarakat yang Berkeselamatan Lalu Lintas*	

		2	**10**	**2**	**.**	**09**	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**- Persentase Peningkatan Penumpang yang menggunakan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	35%	33%	**Rp 3,810,539,478**	33%	**Rp 4,191,593,426**	34%	**Rp 4,610,752,768**	35%	**Rp 5,071,828,045**	35%	**Rp 5,579,010,850**	**35%**	**Rp 5,579,010,850**	*(Jumlah Penumpang) / (Jumlah Tempat Duduk × Rate × Hari Operasi) × 100%*	

		.15	**10**	**2**	**.**	**09**	**0**	**1**	Penyediaan Angkutan Umum untuk JasaAngkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Penumpang Angkutan Sekolah yang Terlayani	961 Pnp/ Hari	**691 Pnp/ Hari**	Rp 3,615,625,288	**691 Pnp/ Hari**	Rp 3,977,187,817	**1032 Pnp/ Hari**	Rp 4,374,906,598	**1420 Pnp/ Hari**	Rp 4,812,397,258	**1420 Pnp/ Hari**	Rp 5,293,636,984	**1420 Pnp/ Hari**	Rp 5,293,636,984	*Jumlah Total Penumpang Bus Sekolah*	

								- Load faktor Trans Metro	35%	**33%**		33%		33%		34%		35%		**35%**		*(Jumlah Penumpang) / (Jumlah Tempat Duduk × Rate × Hari Operasi) × 100%*	

								- Jumlah Pos pengawasan dan pengendalian Lalin dan angkutan saat lebaran	2pos	2pos		2pos		2pos		2pos		2pos		2pos		2pos		2pos		*Jumlah Total Pos yang Tersedia*			

		2.15	**10.2.09**			Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	- Persentase kendaraan yg masuk angkutan barang dan masuk kota	20%	20%	Rp 194,914,190	20%	Rp 214,405,609	20%	Rp 235,846,170	20%	Rp 259,430,787	20%	Rp 285,373,866	**100 %**	Rp 285,373,866	*(Jumlah Realisasi Kendaraan yang Masuk Angkutan Barang dan Masuk Kota) / ((Jumlah Target Kendaraan yang Masuk Angkutan Barang dan Masuk Kota)) × 100%*	

							- Tersedianya angkutan umum orang/ barang yang memadai/ efektif	10800 Kendaraan	**11000 Kendaraan**		**11200 Kendaraan**		**11400 Kendaraan**		**11600 Kendaraan**		**11800 Kendaraan**		**12000 Kendaraan**		*(Jumlah Kendaraan Barang Masuk) per Tahun*	

						- Terciptanya kanselt ibcarla ntas angkut an nataru	1 Posko	**1 Posko**		**1 Posko**		**1 Posko**		**1 Posko**		**1 Posko**		**1 Posko**		*Jumlah Total Pos yang Tersedia*	
						- Jumlah keluar masuk termin al barang	10800	**11000**		**11200**		**11400**		**11600**		**11800**		**12000**		*Jumlah Angkutan Barang Masuk Terminal per Tahun*	

		2	1	0	5	3		**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	- Persentase Pelayanan Pelayaran Pada Pelabuhan Pengumpan Lokal di Kota Denpasar	35%	**60%**	**Rp 381,140,000**	70%	**Rp 419,250,000**	78%	**Rp 461,180,000**	83%	**Rp 507,290,000**	85%	**Rp 558,020,000**	85%	**Rp 558,020,000**	*Jumlah Persentase Pemenuhan Sarpras*	Dinas Perhubungan Kota Denpasar

		2.15	**10.53**	**2.12**		**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**Persentase Peningkatan pemenuhan Sarpras Pengoprasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**		**30%**	**Rp 381,140,000**	34%	**Rp 419,250,000**	36%	**Rp 461,180,000**	38%	**Rp 507,290,000**	40%	**Rp 558,020,000**	40%	**Rp 558,020,000**	*(Jumlah Fasilitas Pelabuhan yang Tersedia) / (Jumlah Fasilitas Total yang harus ada di Pelabuhan) × 100%*	
		2.15	10.53	2.12	02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	- Tersusunnya dokumen FS Kawasan Pelabuhan pengumpan Lokal /		3 Dokumen	Rp 266,798,000	3 Dokumen	Rp 293,475,000	1 Dokumen	Rp 322,826,000	1 Dokumen	Rp 355,103,000	8 Dokumen	Rp 390,614,000	8 Dokumen	Rp 390,614,000	*Jumlah Dokumen yang tersusun*	

						Dermaga di kecamaqtan densel dan dentim																	
						Pengoprasian dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Jumalah Kunjungan Kapal		5%	Rp 114,342,000	7.00 %	Rp 125,775,000	13%	Rp 138,354,000	25%	Rp 152,187,000	50%	Rp 167,406,000	50%	Rp 167,406,000	*((Jumlah Kapal yang Beroperasi tahun (ke-n))-(tahun n-1) / (Jumlah Kapal (n-1) × 100%*	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Denpasar yang mengacu pada tujuan dan sasaran sebagaimana telah diuraikan pada Bab IV di atas. Selanjutnya pada bab ini akan dijabarkan lebih lanjut mengenai indicator kinerja Dinas Perhubungan Kota Denpasar dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar 2021 – 2026.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel 7.1 berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Denpasar

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target					Kondisi Akhir Tahun 2026	Formulasi
				2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Peningkatan Load Faktor Angkutan	Persentase (%)	35%	33%	33%	34%	35%	35%	35%	$\frac{Jumlah\ Penumpang}{Jumlah\ Tempat\ Duduk \times Hari\ Operasi} \times 100\%$
2.	Pemenuhan prasarana dan fasilitas LLAJ dan Angkutan Laut	Persentase (%)	58%	60%	62%	65%	70%	80%	80%	$\frac{Jumlah\ Prasarana\ yang\ Berfungsi\ Baik}{Kebutuhan\ Prasarana} \times 100\%$
3.	Persentase sarana angkutan yang berkeselamatan	Persentase (%)	56%	55%	57%	60%	70%	75%	75%	$\frac{Jumlah\ Kendaraan\ yang\ Uji\ Baik}{Jumlah\ Kendaraan\ Wajib\ Uji \times 2} \times 100\%$

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Indikator Kinerja Daerah sebagaimana tercantum pada Tabel 8.2 Rancangan Awal RPJMD Kota Denpasar Semesta Berencana Tahun 2021 – 2026, ditampilkan pada Tabel 7.2.

Penetapan Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kota Denpasar yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) memuat terdiri dari 9 indikator. Indikator yang pertama adalah Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum yang memuat pada tahun 2020 sebesar 223,220 jiwa, tahun 2021 sebesar 234,171 jiwa, tahun 2022 sebesar 215,088 jiwa, tahun 2023 sebesar 229,530 jiwa, tahun 2024 sebesar 243,973 jiwa, tahun 2025 sebesar 258,416 jiwa, tahun 2026 sebesar 272,858 jiwa, dan jumlah pada saat kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD sebesar 272,858 jiwa. Jumlah Kunjungan Kapal Penumpang Angkutan Laut merupakan indikator kedua dari 9 indikator yang mana pada tahun 2020 sejumlah 3,560 unit, tahun 2021 sejumlah 3,650 unit, tahun 2022 sejumlah 5,475 unit, tahun 2023 sejumlah 5,840 unit, tahun 2024 sejumlah 6,205 unit, tahun 2025 sejumlah 6,935 unit, tahun 2026 sejumlah 8,395 unit, dan pada saat kondisi kinerja akhir periode RPJMD sejumlah 8,395 unit.

Indikator yang ketiga merupakan Persentase Layanan Angkutan Darat/*Load Factor* menampilkan pada tahun 2020 sebanyak 35%, tahun 2021 dan tahun 2022 diperkirakan realisasinya sebesar 33%, tahun 2023 diperkirakan realisasi sebanyak 34%, tahun 2024 sebanyak 35%, tahun 2025 sebanyak 35%, tahun 2026 realisasi diperkirakan sebanyak 35%, serta saat kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD sebanyak 35%. Indikator kinerja yang keempat adalah Jumlah Sepeda Motor menunjukkan pada tahun 2020 memiliki nilai sebanyak 1,171,991 unit, realisasi yang diperkirakan pada tahun 2021 sejumlah 1,315,990 unit, tahun 2022 sejumlah 1,456,989 unit, tahun 2023 memiliki perkiraan realisasi sebesar 1,597,988 unit, tahun 2024 diperkirakan realisasinya sebesar 1,738,987 unit, tahun 2025 sebesar 1,879,986 unit, perkiraan capaian tahun 2026 sejumlah 2,020,985 unit, serta kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD mempunyai nilai sejumlah 2,020,985 unit.

Indikator bagian kelima yaitu Jumlah Uji Kir Kendaraan pada tahun 2020 mencetak angka sebesar 39,435 unit, perkiraan capaian tahun 2021 sebesar 41,801

unit, capaian tahun 2022 diperkirakan sebesar 44,167 unit, tahun 2023 sejumlah 46,553 unit, tahun 2024 sejumlah 48,889 unit, tahun 2025 sebanyak 51,266 unit, 53,632 unit merupakan perkiraan capaian realisasi yang diperoleh tahun 2026, serta pada saat kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD sebanyak 53,632 unit. Indikator yang keenam adalah Jumlah Terminal Bis yang memuat pada tahun 2020 adalah 4 unit, perkiraan capaian tahun 2021 hingga tahun 2025 masing-masing sejumlah 4 unit, tahun 2026 diperkirakan realisasinya meningkat sebesar 1 unit yang mana sejumlah 5 unit, serta pada kondisi kinerja akhir periode akhir RPJMD adalah 5 unit.

Jumlah Pelabuhan/Dermaga adalah indikator kinerja yang ketujuh. Pada indikator tersebut pada tahun 2020 Dinas Perhubungan Kota Denpasar memiliki sebanyak 1 unit, perkiraan realisasi kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 masing-masing berjumlah 1 unit sedangkan, pada tahun 2023 hingga 2026 masing-masing berjumlah sebanyak 4 unit, dan kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD sebanyak 4 unit. Indikator kedelapan adalah Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan yang mana tahun 2020 memuat sebesar 1:2.924, tahun 2021 memiliki rasio sebesar 1:2.924, tahun 2022 mempunyai rasio sebesar 1:3.1286, rasio pada tahun 2023 sebesar 1:3.1968, rasio tahun 2024 sebesar 1:3.265, rasio tahun 2025 sebesar 1:3.3332, tahun 2026 memiliki rasio sebesar 1:3.4014, serta pada saat kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD adalah sebesar 1:3.4014.

Indikator yang terakhir atau yang kesembilan merupakan Jumlah Barang yang Terangkut Angkutan Umum yang memuat pada tahun 2020 sebanyak 10,800 kendaraan, perkiraan capaian tahun 2021 sebanyak 10,800 kendaraan, tahun 2022 diperkirakan memiliki capaian realisasi kinerja sebanyak 11,000 kendaraan, tahun 2023 diperkirakan memiliki capaian realisasi kinerja sebanyak 11,200 kendaraan, perkiraan capaian realisasi kinerja pada tahun 2024 sebanyak 11,400 kendaraan, tahun 2025 memiliki perkiraan capaian realisasi sebanyak 11,600 kendaraan, tahun 2026 memiliki perkiraan capaian realisasi sebanyak 11,800 kendaraan, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD sejumlah 12.000 kendaraan. Kesembilan indikator akan dilaraskan ke dalam tiga indikator yang terdapat di Tabel 7.2 yang tertulis ke dalam RENSTRA. Tiga Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kota Denpasar yang mengacu pada Indikator Kinerja Daerah Kota Denpasar terkandung dalam Tabel 7.2 di bawah ini sebagai berikut.

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kota Denpasar yang mengacu pada Indikator Kinerja Daerah Kota Denpasar

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target					Kondisi Akhir Tahun 2026
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Peningkatan Load Faktor Angkutan	Persentase (%)	35%	33%	33%	34%	35%	35%	35%
2	Pemenuhan prasarana dan fasilitas LLAJ dan Angkutan Laut	Persentase (%)	58%	60%	62%	65%	70%	80%	80%
3	Persentase sarana angkutan yang berkeselamatan	Persentase (%)	70%	55%	57%	60%	70%	75%	75%

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Denpasar Tahun 2021 - 2026 yang berisi tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan bidang perhubungan Kota Denpasar merupakan pedoman bagi Dinas Perhubungan didalam penyelenggaran pembangunan bidang perhubungan selama 5 (lima) tahun kedepan di wilayah Pemerintahan Kota Denpasar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan ini juga menjdi pedoman dalam menyusun program prioritas tiap tahun yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kota Denpasar selama Tahun 2021 - 2026. Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil *(outcomes)* yang ingin dicapai selama jangka waktu satu sampai lima tahun dengan menganalisa potensi, peluang dan kendala yang ada. Rencana Strategis tersebut juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Denpasar.

Hal – hal yang berkembang dan belum terakomodir serta dipandang strategis, akan diinventarisir kemudian dijadikan bahan masukan yang harus dibicarakan dalam forum Tim Teknis Penyusunnan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Denpasar dan instansi terkait lainnya.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PERHUBUNGAN
JALAN GUNUNG GALUNGGUNG, DESA PADANG SAMBIAN KAJA
TELP. (0361) 8443206 – FAX. (0361) 8443208
D E N P A S A R

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR

NOMOR 050/ 238 /DISHUB/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengarahkan pelaksanaan program-program pembangunan guna terwujudnya tujuan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan daerah Kota Denpasar, perlu adanya Rencana Strategis (Renstra) OPD Tahun 2021-2026;

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) pada Dinas Perhubungan Kota Denpasar Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 8);
12. Peraturan Walikota Denpasar tanggal 29 Desember 2020 Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 78);
13. Peraturan Walikota Denpasar tanggal 3 Januari 2017 Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota kepada Kepala Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Review Rencana Strategis (Renstra) pada Dinas Perhubungan Kota Denpasar Tahun 2021-2026, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah :

a. mengkaji dan mengevaluasi Renstra OPD Tahun 2021-2026 termasuk capaian kemajuannya;
b. mempelajari visi, misi dan perencanaan yang telah ditetapkan Dinas Perhubungan Kota Denpasar;
c. mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Renstra OPD Tahun 2021-2026;
d. mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun Renstra OPD Tahun 2021-2026;
e. melakukan diskusi untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya demi kesempurnaan Renstra;
f. menyusun Renstra OPD Tahun 2021-2026.
g. bertanggung jawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 15 Februari 2021

Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar,

I Ketut Sriawan, SE.
Pembina TK.I
Nip. 19680714 199603 1 003

Tembusan disampaikan kepada :
Yth. 1. Walikota Denpasar
2. Ketua DPRD Kota Denpasar
3. Kepala Bappeda Kota Denpasar
4. Inspektur Kota Denpasar
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
6. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Denpasar
7. Arsip.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR

TANGGAL : 15 Februari 2021
NOMOR : 050/ 238 /DISHUB/2021
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2016-2021

Penanggung jawab :
1. Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar
2. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Denpasar

Ketua : Kepala Bidang Prasarana Transportasi pada Dinas Perhubungan Kota Denpasar

Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Perhubungan Kota Denpasar

Koordinator :
1. Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Denpasar
2. Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Kota Denpasar
3. Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional pada Dinas Perhubungan Kota Denpasar
4. Kepala Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum pada Dinas Perhubungan Kota Denpasar

Anggota :
5. Kepala Sub. Bagian Keuangan pada Dinas Perhubungan Kota Denpasar

1. Sektor Prasarana Transportasi :
   a. Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Prasarana Transportasi pada Bidang Prasarana Transportasi Dinas Perhubungan Kota Denpasar
   b. Kepala Seksi Pengembangan Prasarana Uji pada Bidang Prasarana Transportasi Dinas Perhubungan Kota Denpasar
   c. Kepala Seksi Pembangunan Prasarana Transportasi pada Bidang Prasarana Transportasi Dinas Perhubungan Kota Denpasar

2. Sektor Lalu Lintas :
   a. Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas pada Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Denpasar ;
   b. Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum pada Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Denpasar;

c. Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas pada Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Denpasar ;
d. Kepala UPT Pelayanan Transportasi Darat pada Dinas Perhubungan Kota Denpasar.

3. Sektor Angkutan :
   a. Kepala Seksi Angkutan Orang pada Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Denpasar ;
   b. Kepala Seksi Angkutan Barang pada Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Denpasar ;
   c. Kepala Seksi Angkutan Multimoda pada Bidang Angkutan

Perhubungan Kota Denpasar ;

c. Kepala Seksi Angkutan Multimoda pada Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Denpasar ;
d. Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Denpasar ;
e. Kepala UPT Terminal Penumpang pada Dinas Perhubungan Kota Denpasar ;
f. Kepala UPT Terminal Barang pada Dinas Perhubungan Kota Denpasar .

4. Sektor Pengendalian dan Operasional :
   a. Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Keselamatan pada Bidang Pengendalian dan Operasional Dinas Perhubungan Kota Denpasar;
   b. Kepala Seksi Penegakan Hukum pada Bidang Pengendalian dan Operasional Dinas Perhubungan Kota Denpasar;
   c. Kepala Seksi Patroli dan Inspeksi Keselamatan pada Bidang Pengendalian dan Operasional Dinas Perhubungan Kota Denpasar .

Staf Administrasi : Staf pada Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Perhubungan Kota Denpasar sebanyak 7 (Tujuh) orang.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar,

I Ketut Sriawan, SE.
Pembina TK.I
Nip. 19680714 199603 1 003

Jalan Gunung Galunggung, Desa Padang Sambian Kaja
Telp : (0361)8443206 - Fax.(0361)843208
Email : perhubungan@denpasarkota.go.id
www.perhubungan.denpasarkota.go.id